

# IWGFF

## PERKIRAAN PENGGUNAAN SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI PULP & PAPER

Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP di  
Propinsi Riau



Desember 2010

### **INDONESIAN WORKING GROUP ON FOREST FINANCE**

Kantor Taman A9 Unit A-1, Floor 5 th, Kompleks Mega Kuningan Jakarta Selatan  
Ph. 021-5761070. Email : [iwgff@nusa.or.id](mailto:iwgff@nusa.or.id) Website : [www.forestfinance.org](http://www.forestfinance.org)

Indonesian Working Group on Forest Finance adalah kelompok kerja yang konsern dalam isu Keuangan dan keterkaitannya dengan sector -Industri – Kehutanan. IWGFF diinsiasi sejak 2002 oleh beberapa lembaga dan peneliti akademisi yakni: WALHI, WWF Indonesia, Telapak, Forest Watch Indonesia, INFID, CIFOR, MFP.

## PENGANTAR

Studi Advokasi Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp dan Paper di Indonesia, dengan Studi Kasus di Riau yang dikerjakan oleh Tim Studi IWGFF yang disajikan dalam hasil tulisan ini mengangkat data-data yang terpublikasi oleh Departemen Kehutanan. Beberapa data yang tidak terpublikasi dan dianggap sebagai data “rahasia” perusahaan justru oleh tim studi menjadi data kunci yang harus diangkat dalam studi ini. Data-data terpublikasi misalnya adalah data rekapitulasi luas IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman sampai tahun 2009, sedangkan data yang kurang terpublikasi misalnya data tentang realisasi tanam berdasarkan RKT HTI lebih khusus lagi data tentang realisasi tanaman HTI Pulp khususnya juga data tentang realisasi tanam dan produksi HTI bagi PT RAPP dan PT IKPP di Provinsi Riau.

Oleh karena itu upaya penulisan studi ini dilakukan dengan mencoba menggunakan dokumen data lapangan maupun dokumen resmi Kementerian Kehutanan yang telah terkumpul sampai tahun 2008 khususnya dalam menganalisa perbandingan kebutuhan bahan baku industry pulp secara umum dan PT RAPP dan PT IKPP secara khusus. Meskipun demikian data ijin RKT HTI tahun 2009 di Propinsi Riau bisa diperoleh tim studi.

Hasil studi ini bukan menjadi sesuatu yang baru, namun menjadi hal yang menarik untuk mengupdate kembali informasi kepada public dan para pihak tentang penggunaan bahan baku baik dari hutan alam maupun hutan tanaman (HTI) bagi industry kehutanan khususnya industry pulp dan paper terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Provinsi Riau. Kedua industri ini selain menguasai hampir 60 persen kapasitas terpasang dari total industry pulp di Indonesia sebesar 6,5 juta ton, juga menjadi perhatian para pihak karena ketidak tersedianya bahan baku dari Hutan Tanaman yang harusnya berdiri secara terintegrasi untuk memenuhi pasokan bahan baku kedua industry tersebut.

Akhir kata, penulisan studi ini belum selesai sampai di sini, namun akan selesai dengan baik jika telah menampilkan data dan analisis terbaru tentang data realisasi tanam Hutan Tanaman dan produksi/pasokan bahan baku kedua industry pulp yakni RAPP dan IKPP sampai 2010. Oleh karena itu, demi perbaikan hasil studi ini kami sangat menghargai segala masukan dan tanggapan terhadap hasil hasil temuan dan tulisan yang kami sajikan dalam laporan studi ini.

Jakarta, Desember 2010

Willem Pattinasarany – Tim Penulis IWGFF

## DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	1
I. Pendahuluan	3
II. Kawasan Hutan dan Pemanfaatannya	6
III. Industri Pulp dan Kebutuhan Bahan Baku	12
IV. Membandingkan Kontribusi HTI dan Hutan Alam Bagi PT RAPP dan PT IKPP	24
V. Pemenuhan Bahan Baku dan Kondisi Hutan Alam Riau	32
VI. Penutup	35
Pustaka Bacaan	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Luas IUPHHK	8
Tabel 2.	Perkembangan Pembangunan HPH/IUPHHK-HA 10 tahun terakhir	8
Tabel 3.	Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman 10 tahun terakhir	9
Tabel 4.	Realisasi Penanaman IUPHHK-HTI, Periode Tahun 1989 – 2008	10
Tabel 5.	Jumlah dan Kapasitas Terpasang Industri Kehutanan serta Kebutuhan Bahan Baku	11
Tabel 6.	Presentase Pasokan bahan baku untuk Industri Pulp dari hutan alam dan produksi HTI sepanjang 2003-2008	13
Tabel 7.	Luas Izin Kelompok Perusahaan HTI yang Bermitra dengan PT RAPP	16
Tabel 8.	Luas RKT HTI dan Target Produksi Log pada hutan alam Tahun 2009 perusahaan mitra PT RAPP di Propinsi Riau yang telah disahkan Kementerian Kehutanan	19
Tabel 9.	Kelompok Perusahaan HTI yang Bermitra dengan PT IKPP	20
Tabel 10.	Luas RKT HTI dan Target Produksi Log pada Hutan Alam Tahun 2009 dari perusahaan mitra IKPP di Propinsi Riau yang telah disahkan Kementerian Kehutanan	23
Tabel 11.	Pasokan bahan baku dari hutan tanaman dan hutan alam sepanjang 2004-2008 untuk PT RAPP dan PT IKPP	25
Tabel 12.	Perbandingan Sumber Bahan Baku PT RAPP dan IKPP berdasarkan Ijin RKT Tahun 2009 di Propinsi Riau	28
Tabel 13.	Luas dan Target Produksi RKT HTI Hutan Alam dan Hutan Tanaman Tahun 2009 di Propinsi Riau	29
Tabel 14.	Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Hasil Tata Batas Hutan	33
Tabel 15.	Pembangunan Hutan Tanaman Industri ( IUPHHK-HT ) s/d Tahun 2006 di Provinsi Riau	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Perbandingan Pasokan Bahan Industri Pulp dari HTI dan Hutan Alam di Indonesia Sepanjang 2003-2008	14
Gambar 2.	Grafik Perbandingan Pasokan Bahan Baku Industri Pulp RAPP dan IKPP dari HTI dan Hutan Alam di Riau Tahun 2004-2008	26
Gambar 3.	Proyeksi Perbandingan Bahan Baku HTI & Hutan Alam PT RAPP dan PT IKPP Periode 2007-2014	27
Gambar 4.	Kawasan Gambut yang dijadikan target Ijin RKT HTI di Hutan Alam di Provinsi Riau	30
Gambar 5.	Penyebaran Konsesi HTI Perusahaan Mitra RAPP dan IKPP di Provinsi Riau	33

## Ringkasan Eksekutif

Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri yang dimulai sejak awal 1990 bertujuan selain merehabilitasi lahan-lahan hutan yang sudah rusak, juga diharapkan menjadi penyumbang bahan baku bagi Industri Kehutanan. Perlahan-lahan peran HTI juga diharapkan akan menghilangkan ketergantungan industri kehutanan terhadap hutan alam. Sampai tahun 2008 luas ijin areal HTI atau IUPHHK HTI tercatat 10,03 juta hektar, dan per Desember 2009 menurun menjadi 9,21 jutaan hektar. Sementara itu, berdasarkan realisasi penanaman HTI dari 1990-2008 luas areal HTI yang sudah ditanam seluas 4,292,222 hektar. Angka tersebut menunjukkan angka kumulatif total luas areal HTI yang sudah ditanami sejak awal pembangunan HTI. Sampai tahun 2008 berdasarkan daur tebang 7 – 10 tahun, data realisasi penanaman HTI ini sudah memasuki daur kedua atau ketiga. Artinya sudah ada pemanenan/penebangan sesuai daur penebangan. Oleh karena data real luas tanaman yang saat ini ada (existing) belum bisa dipastikan. Namun dengan menggunakan asumsi daur tebang 7 tahun maka berdasarkan data realisasi tanam, HTI **2002 – 2008** dapat diperkirakan seluas **1,414,329 Ha**.

Perkembangan industri pulp di Indonesia pesat selama dua puluh tahun terakhir, meningkat dari 0.5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 6.5 juta ton pada tahun 2010 dengan kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m<sup>3</sup> setiap tahunnya<sup>1</sup>. Dari 7 perusahaan pulp di Indonesia, kurang lebih 4 juta ton diantaranya dikuasai oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau<sup>2</sup>, dan selama lima tahun terakhir ternyata sumbangan bahan baku dari hutan alam kepada industri pulp rata-rata pertahunnya sebesar **54 persen**, dan sisanya pasokan bahan baku dari hutan tanaman.

Sementara realisasi penanaman HTI PT RAPP sendiri hingga April 2009 telah mencapai luasan 295.332 ha, dari luasan ini sekitar 76.194 ha telah dilakukan pemanenan. Realisasi penanaman HTI setiap tahun menunjukkan luasan yang bervariasi mulai dari yang terendah seluas 9.038 hektar di tahun 2000 dan yang tertinggi di tahun 2007 seluas 32.558 hektar. Selama periode 2004 – 2008 PT RAPP dan PT IKPP rata-rata setiap tahunnya masih mengandalkan 50 % pasokan bahan baku dari hutan alam atau 8,8 juta M<sup>3</sup> dan sisanya sekitar 8,9 juta M<sup>3</sup> dari Hutan Tanaman. Tidak jauh berbeda, target pemenuhan bahan baku yang muncul dari Ijin RKT di tahun 2009 juga menunjukkan angka 54,99 % yang berasal dari hutan alam. Jika dilihat dari pola selama lima tahun yang dimana baik realisasi tanam, target dan produksi hutan tanaman yang kurang dari 50 % maka bukan tidak mungkin pemenuhan bahan baku dari hutan alam khususnya di Propinsi Riau akan terus berjalan guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi PT RAPP dan PT IKPP

Konsistensi komitmen Pemerintah untuk melindungi sumberdaya hutan yang terus digempur melalui program-program konversi hutan alam, dan target bahan baku semakin serius

---

<sup>1</sup> Direktori Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (2007).

<sup>2</sup> FWI 2008, "Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam".

dibutuhkan sebagai upaya melindungi sumberdaya hutan di satu sisi, dan di sisi lain sebagai upaya penghormatan kepada komitmen Presiden dalam program REDD untuk ikut mengurangi kecepatan laju Deforestasi dan Degradasi hutan khususnya di Propinsi Riau.

Moratorium penggunaan hutan alam sebagai target pemenuhan bahan baku bagi industry pulp paper adalah sebuah kebijakan yang bukan tabu untuk dilakukan. Lebih khusus bagi PT RAPP dan PT IKPP yang wajib membangun industry hutan tanamannya secara terintegrasi dengan kebutuhan pabrik pulp papernya. Kebijakan moratorium juga akan memaksa pembangunan hutan tanaman termasuk ikut terbangunnya hutan tanaman Rakyat dapat segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry pulp paper. Jika Pemegang ijin HTI tidak sanggup dilakukan maka ijin-ijin HTI dapat segera dicabut karena ketidak seriusan perusahaan untuk menanam. Selain itu, kontrol terhadap pencurian kayu (*illegal logging*) guna memasok bahan baku illegal bagi industry pulp paper khususnya PT RAPP dan PT IKPP di Propinsi Riau mudah dilakukan.



Pembangunan di bidang kehutanan saat ini semakin menjadi fokus perhatian dunia. Isu pemanasan global dan perubahan iklim membuat dunia mendesain ulang cara dan model pengelolaan atas sumberdaya alam dan lingkungan. Tingkat emisi carbon di udara yang semakin menggerogoti lapisan atmosfer dan membuat bumi semakin panas memaksa negara-negara di dunia mencari komitmen bersama untuk mengatasi dan menurunkan tingginya emisi carbon di udara. Komitmen negara-negara dunia untuk menurunkan emisi carbon saah satunya adalah melindungi dan melestarikan kawasan hutan untuk menyerap carbon. Strategi ini telah mendorong negara-negara yang mempunyai kawasan hutan tropis dan negara-negara industri maju yang bersedia membayar penurunan emisi karbon untuk terlibat dalam skema jual beli karbon dengan sasaran perlindungan atas kawasan hutan.

Di lain sisi, skema perlindungan kawasan hutan melalui mekanisme jual beli karbon telah menimbulkan kekuatiran para pengusaha kehutanan terhadap keberlangsungan industri pengelolaan hutan di negara-negara ternasuk Indonesia yang menjadikan sumberdaya hutan sebagai salah satu sector yang mendatangkan pendapatan bagi Negara. Skema perdagangan dikuatirkan akan membunuh bisnis industri kehutanan yang masih mengandalkan sumber bahan baku kayu dari hutan alam. Sebaliknya, skema perlindungan hutan bisa memaksa negara-negara pemilik kawasan hutan untuk membangun hutan yang

mengalami deforestasi dan degradasi agar kembali ditanami atau direstorasi melalui program-program penghutan kembali (*reforestasi*) dan pembangunan hutan-hutan tanaman.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki luas hutan alam terluas ke tiga di dunia. Dengan luas tutupan hutan  $\pm$  120 juta hektar, Indonesia masuk menjadi negara penting yang berperan dalam upaya penurunan emisi karbon dan mengurangi pemanasan global melalui skema perlindungan hutan yang memanfaatkan fungsi kawasan hutan sebagai penyerap karbon di udara. Tetapi seperti di ketahui, dengan luas dan tersebar nya hutan alam di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, sumberdaya hutan masih menjadi salah satu modal pendapatan negara melalui bisnis di sektor kehutanan yang ditandai dengan adanya 1881 jumlah industri kehutanan yang beroperasi yang terus berkontribusi bagi pendapatan devisa Negara.

Disadari bahwa dengan berkembangnya pertumbuhan industri kehutanan di Indonesia, maka ketersediaan bahan baku menjadi sebuah keniscayaan yang harus tetap tersedia. Ekspansi kapasitas, dan perluasan ijin pendirian industri kayu baru hanya akan berakibat pada tekanan terhadap hutan-hutan tropis di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya karena harus mensuplai bahan baku bagi beroperasinya industri kayu.

Sumber siaran pers Dephut September 2005 memperkirakan angka kebutuhan bahan baku industri kehutanan berdasarkan ijin yang ada adalah; industri Sawmill, kebutuhan bahan baku 22,09 juta m<sup>3</sup> per tahun, selanjutnya Plymill 18,87 juta m<sup>3</sup> per tahun, pulpmill kebutuhan bahan baku 17,91 juta m<sup>3</sup> per tahun, dan lain-lain sebanyak 150 unit dengan kebutuhan bahan baku 4,61 juta m<sup>3</sup> per tahun. Berdasarkan ijin usaha yang telah diterbitkan tersebut kebutuhan bahan baku kayu yang dibutuhkan per tahun mencapai 63,48 juta m<sup>3</sup>, sedangkan kemampuan produksi kayu bulat rata-rata per tahun sebesar 22,8 juta m<sup>3</sup>, yang bersumber dari hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat, dan sumber lain. Hal ini mengakibatkan terjadi kesenjangan kebutuhan bahan baku sebesar 40,60 juta m<sup>3</sup> per tahun<sup>3</sup>. Data Kemenhut s/d Desember 2009 menunjukkan angka produksi kayu bulat dari berbagai sumber adalah 37,602,495.98 Juta meter kubik<sup>4</sup>.

Terhadap angka kebutuhan bahan baku berdasarkan kapasitas terpasang industri kehutanan, dimana adanya ketimpangan antara kebutuhan tersebut dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari produksi kayu bulat antara lain telah mendorong terjadinya pencurian kayu di hutan negara, serta menurunnya kinerja industri yang menyebabkan antara lain menurunnya dan bahkan penghentian produksi oleh beberapa industri pengolahan hasil hutan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Siaran Pers Dephut: S.569/II/PIK-1/2005 Tanggal 15 September 2005: Industri Kehutanan Prospektif Dengan Investasi 27,8 Milyar Us \$.

<sup>4</sup> Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2009

<sup>5</sup> Dokumen Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 PERMEN Nomor : P.08/Menhut-II/2010

Departemen Kehutanan serta para pemangku kepentingan menyadari persoalan kesenjangan kebutuhan bahan baku industri per kayu tersebut dan persoalan pembalakan liar menjadi penghambat revitalisasi industri kehutanan. Masa depan industri per kayu Indonesia pun disadari akan tergantung pada keberhasilan pengembangan hutan tanaman<sup>6</sup>. Pemenuhan bahan baku bagi industri per kayu yang bersumber dari hutan tanaman (HTI dan Hutan Tanaman Rakyat) sekalipun mengalami peningkatan luas areal tanam berdasarkan ijin yang dikeluarkan setiap tahun namun senyatanya belum menjadi harapan untuk menggantikan peran hutan alam sebagai pemasok bahan baku bagi industri per kayu. Alhasilnya, hutan alam tetap menjadi target kebutuhan bahan baku. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk memaksa industri kehutanan yang “wajib” terintegrasi dengan pengembangan hutan tanaman seperti industri pulp agar menghentikan penebangan hutan alam dan fokus dalam pengembangan hutan tanaman.

Studi advokasi ini akan melihat secara singkat keberadaan perkembangan industri kehutanan di Indonesia khususnya Industri Pulp Paper dengan fokus pada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Propinsi Riau. Secara menyeluruh studi ini bertujuan mengangkat isu keberadaan PT RAPP dan PT Indah Kiat Pulp and Paper bersama mitra-mitra bisnisnya telah menguasai sebagian besar lahan hutan alam di Propinsi Riau sebagai target pemenuhan bahan baku bagi pabrik pulpnya. Sementara itu, realisasi pemenuhan bahan baku dari Hutan Tanaman jauh dari target yang diharapkan pemerintah pada tahun 2009, dan secara kontroversial memperpanjang izin penggunaan hutan alam sebagai sumber bahan baku pabrik pulp.

Laporan studi ini akan menyajikan secara singkat data per 2009 kawasan hutan dan pemanfaatannya serta data tentang trend perkembangan izin usaha perhutanan hutan alam dan hutan tanaman, dan berlanjut menyajikan kebutuhan bahan baku industri kehutanan termasuk industri pulp secara khusus melihat pasokan bahan baku bagi PT RAPP dan PT IKPP baik dari hutan alam maupun hutan tanaman, serta sajian tentang perkembangan luas izin dan target produksi dari HTI di tahun 2009 dan 2010 di atas hutan alam dan analisis asumsi realisasinya.

---

<sup>6</sup> Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia Dipersiapkan. In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan Departemen Kehutanan. 2007



Meningkatnya pemberitaan tentang isu pembangunan kehutanan Indonesia dewasa ini telah terdorong oleh berbaliknya pandangan terhadap pemanfaatan hutan. Sejak tiga decade belakangan ini pemanfaatan hutan lebih diutamakan untuk menjadi barang produksi skala besar guna kepentingan ekonomi. Saat ini pembangunan kehutanan semakin didorong untuk lebih mengutamakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya hutan sebagai sebuah kosekuensi logis dari berubahnya iklim bumi akibat meningkatnya zat carbon di udara. Fungsi hutan sebagai penyerap carbon diharapkan dapat menjadi salah satu solusi menurunkan efek gas rumah kaca (GRK) yang dapat memicu meningkatnya suhu bumi (*global warming*).

Pergeseran perubahan fokus pemanfaatan hutan yang terus berjalan bagi Indonesia hendaknya tetap sejalan dengan hakekat dasar pemanfaatan dan pembangunan kehutanan. Hutan yang diyakini merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sebagai salah satu modal dasar pembangunan seharusnya ditujukan guna mensejahterkan rakyat dan bangsa sebagaimana tertera dalam konsitusi negara. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 telah menyebutkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan bangsa dan Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Oleh karena itu kekayaan ini wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sepanjang 32 tahun pemerintahan orde baru dan 10 tahun era reformasi, pembangunan kehutanan ternyata masih bertumpu pada peningkatan produksi hasil hutan kayu sebagai salah satu upaya menjangkit pendapatan negara. Sementara itu upaya-upaya rehabilitasi hutan melalui program-program penanaman pohon, pengembangan Taman Nasional dan kawasan Konservasi serta Hutan Lindung, menjadi kurang nyata dan terkadang bisa dihiraukan dengan kebijakan pembangunan perkebunan sawit, tambang, dan pembangunan daerah/kota baru yang mengakibatkan konversi hutan tak bisa dihindari. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan di wilayah hutan ini, kerusakan hutan menjadi masalah yang sangat nyata berada di depan mata. Walaupun angka penurunan penggundulan hutan di Indonesia terus terkoreksi, namun belum beranjak dari angka 1 juta hektar per tahun. (Kementerian kehutanan melansir laju deforestasi hutan Indonesia sebesar 1,08 juta Ha per tahun).

Disisi lain, upaya-upaya pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dari 48,8 juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan dimana terdapat kurang lebih 10,2 juta (dari 220 juta penduduk Indonesia, tahun 2003) secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal masih perlu mendapat perhatian dari rencana pembangunan kehutanan secara nasional.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan tetap menggunakan pendekatan dalam menyusun rencana pembangunan hutan secara nasional dengan membagi kawasan hutan menjadi bagian-bagian tertentu berdasarkan fungsinya yaitu; fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Sampai dengan Juni 2010 luas kawasan hutan dan pemanfaatan hutan produksi secara singkat disajikan dalam uraian di bawah.

## II. A. Luas Kawasan Hutan Indonesia

Menurut data Kementerian Kehutanan, sampai dengan Juni 2010 luas kawasan hutan di Indonesia adalah 136.559.885,28 ha<sup>7</sup>

1. Hutan KSA/KPA : 23.610.098,57 ha
2. Hutan Lindung (HL) : 31.029.946,02 ha
3. Taman Buru : 109.351,00 ha
4. Hutan Produksi (HP) : 37.175.870,43 ha
5. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 22.059.660,26 ha
6. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) : 22.574.959,00 ha

Dari data di atas, Hutan Produksi sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan seluas 82.407.828,69 ha atau hampir 60% dari total luas kawasan

---

<sup>7</sup>Laporan Perkembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Triwulan II (April-Juni 2010). Bina Produksi Kehutanan.

hutan. Berdasarkan perkembangan data s.d bulan Juni 2010, dari seluas 82.407.828 ha kawasan Hutan Produksi tersebut telah dimanfaatkan dalam bentuk IUPHHK sesuai SK.IUPHHK adalah seluas 34.975.802,09 ha. Ini berarti ada sekitar  $\pm$  35 juta ha atau 42,75 % dari luas hutan produksi.

Menurut data Kementerian Kehutanan, sampai dengan Juni 2010 jumlah IUPHHK dalam pemanfaatan hutan mengalami penambahan 3 unit ijin baru di Provinsi Jambi, Kalteng, Kaltim dan 1 unit izin yang dicabut di Provinsi Kalbar. Sedangkan untuk IUPHHK-HTI terdapat penambahan izin baru sebanyak 4 unit (1 unit di Provinsi Bangka Belitung, 1 unit di Provinsi Kaltim dan 2 unit di Provinsi Kalbar) sedangkan untuk areal pencadangan HTR terdapat penambahan sebanyak 7 lokasi areal pencadangan yang tersebar di 5 provinsi. Selanjutnya data perkembangan IUPHHK sampai Juni 2010 yang dirilis Kementerian Kehutanan seperti terlihat pada table 1 di bawah

Tabel 1: Sebaran Luas IUPHHK

No	IUPHHK	Luas (ha)	Jumlah unit	Keterangan
1	Hutan Alam	25.041.992	304 unit	Tersebar di 21 Provinsi di luar pulau Jawa
2	Hutan Tanaman Industri	9.356.532,36	236 unit	SK Dfinitif dan SK Sementara
3	Bukan Kayu	21.620	1 unit	Di provinsi Riau
4	Hutan Tanaman Rakyat	555.657,73		Tersebar di 23 propinsi

Sumber: Laporan Perkembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Triwulan II (April-Juni 2010). Ditjen Bina Produksi Kehutanan.

## II. B. Trend Perkembangan Pembangunan IUPHHK-Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Laporan Kementerian Kehutanan menyebutkan perkembangan IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT (HTI dan HTR) 2000-2009 adalah sbb:

Tabel 2: Perkembangan Pembangunan HPH/IUPHHK-HA 10 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah/unit	Luas Areal (juta ha)
1	2000	362	39,16
2	2001	351	36,42
3	2002	270	28,08
4	2003	267	27,80
5	2004	287	27,82
6	2005	285	27,72
7	2006	322	28,78
8	2007	324	28,27
9	2008	308	26,16
10	2009	306	25,64

Sumber: Ditjen Bina Produksi Kehutanan

\*Data sd Desember 2009

Tren perkembangan IUPHHK-Hutan Alam mengalami fluktuasi baik perkembangan jumlah unit maupun luas arealnya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa izin yang dicabut dan dibatalkan tetapi juga pada tahun tertentu juga ada izin yang diperpanjang dengan perubahan luas areal dan izin baru yang dikeluarkan.

Sementara itu trend perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman pun turut berfluktuasi sama seperti perkembangan IUPHHK Hutan Alam dikarenakan adanya pencabutan dan perluasan izin pada tahun-tahun tertentu. Selanjutnya perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman dapat dilihat pada table 3 sbb:

Tabel 3: Perkembangan IUPHHK Hutan Tanaman 10 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah/unit	Luas Areal (juta ha)
1	2000	98	4,44
2	2001	100	4,52
3	2002	103	4,55
4	2003	105	4,63
5	2004	114	5,80
6	2005	113	5,73
7	2006	130	6,19
8	2007	247	9,88
9	2008	227	10,03
10	2009**	230	9,21

Sumber Ditjen Bina Produksi Kehutanan

\*Terdiri dari SK Defitif , SK Semnetara, dan SK Pencadangan

\*\*Data terakhir Desember 2009

Berdasarkan data pada table 1, terlihat bahwa khususnya target pemerintah untuk memenuhi target luas areal HTI sampai tahun 2009 telah terpenuhi seluas 9.208.506 Ha. Hanya saja data yang tersaji/terpublikasi adalah data luas areal yang kemudian harus di cross check dengan realisasi tanam tanaman HTI dari setiap tahun berdasarkan izin-izn IUPHHK-HTI yang telah dikeluarkan. Berdasarkan luas areal real penanaman dapat dilihat komitmen pemerintah untuk mewajibkan setiap industri kehutanan untuk menggunakan pasokan bahan baku dari Hutan Tanaman.

Untuk melihat data real penanaman Hutan Tanaman di lapangan, dalam studi ini data yang dapat dikumpulkan adalah realisasi tanam Hutan Tanaman sampai tahun 2008 seperti terlihat pada table 4 di bawah.

Tabel 4: Realisasi Penanaman IUPHHK-HTI, Periode Tahun 1989 – 2008

NO	TAHUN	REALISASI PENANAMAN (Ha)
(1)	(2)	(4)
1	1989/1990	131,655
2	1990/1991	169,874
3	1991/1992	213,991
4	1992/1993	234,853
5	1993/1994	373,607
6	1994/1995	296,786
7	1995/1996	326,448
8	1996/1997	390,542
9	1997/1998	269,109
10	1998/1999	182,578
11	1999/2000	138,662
12	2000	82,317
13	2001	67,472
14	2002	118,508
15	2003	124,691
16	2004	131,914
17	2005	163,125
18	2006	231,954
19	2007	357,200
20	2008	286,937
<b>TOTAL</b>		<b>4,292,222</b>

Sumber Dephut, 2008

Berdasarkan tabel 4 di atas realisasi penanaman HTI sampai tahun 2008 seluas 4,292,222 ha. Angka realisasi penanaman HTI di atas seluas 4.292.222 ha adalah angka penjumlahan kumulatif total luas areal HTI yang sudah ditanami sejak awal pembangunan HTI dan sudah memasuki daur kedua atau ketiga. Dimana tentu saja sejak dimulainya pembangunan HTI sejak tahun 1990-2008 (dengan asumsi penanaman pada tahun 1990 dan daur tebang 7-10 tahun) maka pada tahun 1997-2000 sudah terjadi pemanenan tahap I, dan pemanenan tahap II sudah terjadi pada tahun 2007. Oleh karena itu, data Kementerian Kehutanan tentang realisasi penanaman HTI pasca pemanenan tahap I dan II tidak bisa dijadikan sebagai angka realisasi penanaman sampai saat ini.

Data total realisasi tanam yang sebenarnya saat ini di lapangan (*existing*) belumlah terhitung dan/atau terpublikasi dengan sebenarnya. Namun dengan perhitungan sederhana, jika kita menggunakan asumsi daur tebang 7 tahun maka berdasarkan tabel 4 di atas, perhitungan real tanaman HTI di lapangan sejak 2002 – 2008 dapat diperkirakan seluas 1,414,329 Ha. Tetapi angka ini dapat terkoreksi jika kita mengasumsikan bahwa telah terjadi pemanenan tahap II pada tahun 2007, maka terlihat data realisasi penanaman sebenarnya saat ini akan dihitung pada jumlah penanaman di tahun 2008 yaitu sebesar 286.937 Ha untuk seluruh jenis HTI.

Sementara itu , data tentang realiasi produksi/penebangan hutan tanaman dari tahun ke tahun juga belum terpublikasi dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Padahal dengan tersedianyanya data ini, maka public khususnya pemerhati kehutanan dapat mengetahui sejauh mana kontribusi HTI untuk menggantikan peran hutan alam bagi suplai bahan baku industry kehutanan dapat diandalkan. Dalam pernyataan yang dikutip media baru-baru ini, Kementerian Kehutanan dalam hal ini Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman menyatakan bahwa produksi kayu hutan tanaman dari hasil pemanenan lahan seluas 200 ribu hektar akan digunakan untuk mendukung pemenuhan bahan baku kayu industry kehutanan nasional, dimana 60% diserap oleh industry pulp dan sisanya atau 15 % diserap oleh industry pengolahan kayu lainnya. Sementara untuk menutupi kekurangan suplai atau kebutuhan bahan baku total kapasitas 23-30 juta M<sup>3</sup> industry kehutanan akan dipenuhi dari hutan alam<sup>8</sup>.

Tabel 5 : Jumlah dan Kapasitas Terpasang Industri Kehutanan serta Kebutuhan Bahan Baku<sup>9</sup>

No	Unit industri	Jumlah (unit)	Kapasitas (juta M <sup>3</sup> )	Kebutuhan Bahan Baku (juta M <sup>3</sup> )
1	Saw Mill	1618	11,05	22,09
2	Plymill	107	9,43	18,87
3	Pulpmill	6	3,98	17,91
4	Industri Pengolahan kayu lainnya	150	5,23	4,61
	<b>Total</b>	<b>1881</b>	<b>29,69</b>	<b>63.48</b>

Sumber: Dephut, 2010. (Diolah)

<sup>8</sup>[www.antaraneews.com/berita/1257939594/produksi-kayu-hti-diperkirakan-18-juta-m3](http://www.antaraneews.com/berita/1257939594/produksi-kayu-hti-diperkirakan-18-juta-m3) - 28 oct 2010.

<sup>9</sup> Dokumen Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 PERMEN Nomor : P.08/Menhut-II/2010 Siaran Pers Dephut: S.569/II/PIK-1/2005 Tanggal 15 September 2005: Industri Kehutanan Prospektif Dengan Investasi 27,8 Milyar Us \$, dan Siaran Pers Dephut: S.569/II/PIK-1/2005 Tanggal 15 September 2005: Industri Kehutanan Prospektif Dengan Investasi 27,8 Milyar Us \$.



Kapasitas pabrik pulp di Indonesia berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir, meningkat dari 0.5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 6.5 juta ton pada tahun 2010 dengan kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m<sup>3</sup> setiap tahunnya<sup>10</sup>. Penambahan kapasitas produksi pada industri pulp dan kertas yang sudah ada dan adanya rencana investasi baru pada waktu mendatang akan terus menambah kapasitas produksi industri pulp dan kertas di Indonesia dan tentunya kebutuhan bahan baku yang semakin tinggi.

Pada awalnya seluruh pasokan bahan baku industri pulp seluruhnya berasal dari hutan alam. Seiring dengan dimulainya pembangunan hutan tanaman yang tujuan awalnya untuk merehabilitasi kawasan hutan yang kritis peran hutan tanaman kemudian diarahkan sebagai pemasok bahan baku industri kehutanan untuk menggantikan peran hutan alam. Namun sampai saat ini realisasi pembangunan hutan tanaman masih sangat lambat. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap hutan alam terus terjadi. Dalam enam tahun terakhir setelah sejarah pembangunan hutan tanaman yang telah berlangsung selama lebih dari dua decade, ternyata kemampuan pasokan bahan baku dari hutan tanaman pertahunnya hanya sebesar  $\pm 46$  persen, kekurangannya masih mengandalkan pasokan dari hutan alam  $\pm 54$  persen, atau rata-rata sekitar 15,5 juta M<sup>3</sup> setiap tahun bagi industri kehutanan. (lihat: tabel 6).

---

<sup>10</sup> Direktori Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (2007).

Tabel 6: Presentase Pasokan bahan baku untuk Industri Pulp dari hutan alam dan produksi HTI sepanjang 2003-2008

Tahun	Kapasitas Pabrik (Ton)	Kebutuhan Bahan Baku (M3)	Realisasi Produksi HTI (M3)	Pasokan Kayu Hutan Alam (M3)	Persentase HA (%)
2003	6,287,100	28,291,950	5,343,353	22,948,597	81
2004	6,287,100	28,291,950	7,329,028	20,962,922	74
2005	6,447,100	29,011,950	12,818,199	16,193,751	56
2006	6,483,100	29,173,950	11,451,249	17,722,701	61
2007	6,483,100	29,173,950	20,614,209	8,559,741	29
2008	6,483,100	29,173,950	22,321,885	6,852,065	23

Sumber: Dephut, (diolah)

Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI (*HTI pulp*, HTI pertukangan dan HTI lainnya)

Data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa trend penggunaan bahan baku dari hutan alam semakin menurun sepanjang 2003-2008 dari 81 % di tahun 2003 menurun menjadi 23 % di tahun 2008 atau rata-rata 54 % per tahun. Namun demikian ini belum memperlihatkan perbandingan sesungguhnya karena seluruh realisasi produksi HTI yang ditunjukkan di atas sudah termasuk total bahan baku dari HTI yang pasok bagi kebutuhan industri Pulp (*HTI Pulp*), maupun bagi industri kayu lainnya yang pasokan bahan bakunya juga dari Hutan Tanaman (*HTI pertukangan*, dan *HTI lainnya*)<sup>11</sup>. Artinya, sesungguhnya produksi bahan baku dari HTI Pulp yang digunakan sebagai bahan baku bagi Industri Pulp berdasarkan table 6 di atas dapat dikatakan jauh lebih kecil. Perkiraan akan rendahnya pasokan bahan bahan baku Hutan Tanaman bagi Industri Pulp berdasarkan table 6 di atas dilakukan karena sulitnya memperoleh informasi tentang berapa sebenarnya realisasi produksi HTI Pulp setiap tahun yang terbuka ke public.

<sup>11</sup> Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2008 (Statistik Kehutanan 2008, Departemen Kehutanan Tahun 2009).

Gambar 1: Grafik Perbandingan Pasokan Bahan Industri Pulp dari HTI dan Hutan Alam di Indonesia Sepanjang 2003-2008



Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI (HTI *pulp*, HTI pertukangan dan HTI lainnya)<sup>12</sup>

### III. A. Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Pulp RAPP dan IKPP

Sejak awal rencana pengembangan industri pulp, diharapkan dapat terintegrasi dengan HTI-Pulp sebagai sumber bahan bakunya. Dengan adanya HTI-Pulp yang terintegrasi dengan industri pulp maka diharapkan industri pulp tidak menggantungkan sumber bahan bakunya dari hutan alam. Saat ini terdapat 7 perusahaan *pulp* di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 6.5 juta ton, dan kurang lebih 4 juta ton diantaranya dikuasai oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau<sup>13</sup>.

Sebagai industri dengan kapasitas sebesar 4 juta ton, PT RAPP dan PT IKPP membutuhkan kurang lebih 18 juta M3 bahan baku setiap tahun untuk memenuhi kapasitas produksinya. Agar selalu tersedia bahan baku bagi kedua industri ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (dulu Departemen Kehutanan) telah menerbitkan beratus-ratus ijin konsesi HTI (IUPHHK HTI) kepada perusahaan-perusahaan baik anak perusahaan, maupun

<sup>12</sup> Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2008 (Statistik Kehutanan 2008, Departemen Kehutanan Tahun 2009).

<sup>13</sup> FWI 2008, "Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam".

perusahaan mitra kedua perusahaan sejak kebijakan pembangunan HTI dicanangkan tahun 1990. Harapannya dengan hadirnya kebijakan HTI, maka kebutuhan bahan baku industri kehutanan (termasuk industri pulp) akan disuplai dari hasil HTI, dan tidak tergantung pada bahan baku kayu bulat dari hutan alam. Pada kenyataannya, sampai saat ini kedua industri ini belum mampu memasok kebutuhan bakunya murni dari hasil HTI.

### III. A. 1. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

PT. RAPP yang menjadi salah satu pabrik pulp di bawah payung Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), mulai dibangun pada tahun 1992 di Pangkalan Kerinci provinsi Riau. PT RAPP memiliki pabrik *pulp* dan kertas dengan kapasitas produksi 750.000 ton per tahun *pulp*. Kemudian pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan kebutuhan bahan baku kayu *pulp* sebesar  $\pm$  3,5 juta meter kubik per tahun.

Dari sejak awal berdiri sampai saat ini kapasitas pabrik PT RAPP terus menunjukkan peningkatan dan saat ini telah mencapai 2 juta ton *pulp* per tahun. Ditambah kapasitas produksi kertas sebesar 350 ribu ton per tahun, RAPP membutuhkan bahan baku kayu sedikitnya 9,5 juta ton tiap tahun. Bahan baku pulp dan kertas pabrik ini dipasok dari pembangunan HTI PT RAPP serta sumber-sumber lain di luar HTI (MTH).

Saat ini total luas konsesi PT RAPP adalah seluas 350.165 ha<sup>14</sup>. Selain konsesi milik sendiri, PT RAPP juga bekerjasama dengan pihak lain melalui Joint Venture and Joint Operation (JV/JO) dan Hutan Tanaman Rakyat untuk mendukung pasokan bahan baku ke industri pulp PT RAPP. Dari kerjasama ini PT RAPP mendapat tambahan areal seluas 328.392 ha dari JV/JO dan dari HTR seluas 51.695 ha<sup>15</sup>. Sementara realisasi penanaman HTI PT RAPP sendiri hingga April 2009 telah mencapai luasan 295.332 ha, dari luasan ini sekitar 76.194 ha telah dilakukan pemanenan.

Berdasarkan data pada Tabel 7, yang dikumpulkan baik yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan, Dishut Riau, dan Pengecekan Informasi Lapangan, terdapat 65 perusahaan yang bermitra dengan PT RAPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin konsesi PT RAPP sendiri adalah seluas 1,159,047 Ha<sup>16</sup>. Dengan demikian berdasarkan data ini dapat disampaikan bahwa PT RAPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di atas lahan hutan seluas lebih dari satu juta hektar di Propinsi Riau.

---

<sup>14</sup> SK No. 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009.

<sup>15</sup> APRIL 2006, Sustainability Report

<sup>16</sup> Data Per September 2010, Kementerian Kehutanan dan Dishut Riau

Tabel 7: Luas Izin Kelompok Perusahaan HTI yang Bermitra dengan PT RAPP

No	Nama Perusahaan	Izin	Luas Areal (Izin)	Block
1	PT. Titian Tata Pelita	331/Menhut-IV/1998, 25-02-1998	16,647	Senepis & Libo Block
2	PT. Rimba Rokan Lestari	262/Kpts-II/1998, 27-02-1998	34,775	Island
3	PT. Rimba Rokan Lestari	262/Kpts-II/1998, 27-02-1998		Island
4	PT. Rimba Rokan Lestari	262/Kpts-II/1998, 27-02-1998		Libo Block
5	PT. Rimba Rokan Lestari	262/Kpts-II/1998, 27-02-1998		Giam Siak Kecil Block
6	PT. Sumatera Silva Lestari	82/Kpts-II/2001, 15-03-2001	33,390	Libo Block
7	PT. National Timber & Forest Products I	1083/Menhut-IV/1995, 24-07-1995	21,301	Island
8	PT. Ekawana Lestari Dharma	733/Kpts-II/1997, 01-12-1997	9,300	Kampar Peninsula Block
9	PT. RAPP - Langgam	137/Kpts-II/1997	6,057	Tesso Nilo Block
10	PT. Siak Raya Timber	183/Menhut-IV/1997, 13-02-1997	23,030	Tesso Nilo Block
11	PT. Siak Raya Timber	183/Menhut-IV/1997, 13-02-1997		Tesso Nilo Block
12	PT. Siak Raya Timber	183/Menhut-IV/1997, 13-02-1997		Tesso Nilo Block
13	PT. RAPP - Logas South	137/Kpts-II/1997	32,093	Tesso Nilo & Rimbang Baling Block
14	PT. RAPP - Ukui	137/Kpts-II/1997	22,790	Tesso Nilo Block
15	PT. RAPP - Baserah	1547/Menhut-IV/1996	8,369	Tesso Nilo Block
16	PT. RAPP - Pelalawan	1547/Menhut-IV/1996	82,936	Kampar Peninsula Block
17	PT. Rimba Peranap Indah	598/Kpts-II/1996, 16-09-1996	14,434	Tesso Nilo Block
18	PT. RAPP - Baserah	137/Kpts-II/1997	17,581	Tesso Nilo Block
19	PT. Perkasa Baru	410/Menhut-VI/2001, 15-05-2001	13,170	Island
20	PT. Selaras Abadi Utama	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005, 30-12-2002	13,600	Kampar Peninsula Block
22	PT. Rimba Lazuardi	361/Kpts-II/1996, 10-07-1996	23,340	Bukit Tigapuluh Block
23	PT. Wananugraha Bina Lestari	351/Menhut-IV/1998, 27-02-1998	7,465	Tesso Nilo Block
24	PT. Rimba Lazuardi	727/Menhut-IV/1997, 20-07-1997		Tesso Nilo Block
25	CV. Putri Lindung Bulan	522.21/IUPHHKHT/I/2003/005, 25-01-2003	2,138	Tesso Nilo Block
26	PT. Citra Sumber Sejahtera	Kpts.330/XI/2002, 05-11-2002	15,360	Bukit Tigapuluh Block
27	PT. Bukit Batabuh Sei. Indah	Kpts.331/XI/2002, 06-11-2002	13,420	Bukit Tigapuluh Block
28	PT. Rimba Mutiara Permai	522.21/IUPHHKHT/I/2003/008, 27-01-2003	8,030	Kerumutan Block

**Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia"**

Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau

29	PT. Mitra Taninusa Sejati	522.21/IUPHHKHT/I/2003/009, 27-01-2003	7,480	Kerumutan Block
30	PT. Nusa Prima Manunggal	522.1/Dishut/XI/2002/002, 12-11-2002	4,412	Tesso Nilo Block
31	PT. Mitra Kembang Selaras	Kpts.352/XI/2002, 21-11-2002	14,800	Kerumutan Block
32	PT. Bukit Raya Pelalawan	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, 16-12-2002	4,010	Kerumutan Block
33	CV. Tuah Negeri	522.21/IUPHHKHT/I/2003/006, 25-01-2003	1,480	Kampar Peninsula Block
34	CV. Mutiara Lestari	522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, 25-01-2003	499	Kampar Peninsula & Kerumutan Block
35	CV. Mutiara Lestari	522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, 25-01-2003	399	Kampar Peninsula Block
36	CV. Mutiara Lestari	522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, 25-01-2003	3,175	Kampar Peninsula & Kerumutan Block
37	PT. Bina Daya Bintara	02/IUPHHKHT/I/2003, 18-01-2003	7,550	Libo Block
38	PT. Bina Daya Bintara	02/IUPHHKHT/I/2003, 18-01-2003		Libo Block
39	PT. Panca Sarana Selaras	415/Menhutbun-VI/99, 15-03-1999	3,434	Kerumutan Block
40	PT. Panca Sarana Selaras	415/Menhutbun-VI/99, 15-03-1999	1,076	Kerumutan Block
41	PT. Panca Sarana Selaras	415/Menhutbun-VI/99, 15-03-1999	19,601	Kerumutan Block
42	KUD Bina Jaya Langgam	522.21/IUPHHKHT/I/2003/004, 24-01-2003	1,810	Tesso Nilo Block
43	CV. Riau Bina Insani	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001, 01-06-2002	594	Tesso Nilo Block
44	CV. Riau Bina Insani	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001, 01-06-2002	685	Tesso Nilo Block
45	CV. Riau Bina Insani	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001, 01-06-2002	596	Tesso Nilo Block
46	CV. Riau Bina Insani	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001, 01-06-2002	3,132	Tesso Nilo Block
47	PT. Peputra Siak Makmur	522/EKBANG/2690, 09-11-2001	15,269	Libo Block
48	CV. Bhakti Praja Mulia	522.21/IUPHHKHT/I/2003/011, 28-01-2003	6,247	Kampar Peninsula Block
49	PT. RAPP - Tesso East & West	137/Kpts-II/1997	31,283	Tesso Nilo Block
50	PT. RAPP - Baserah (corridor)	256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001	12,784	Tesso Nilo Block
51	PT. RAPP - Baserah	137/Kpts-II/1997	1,170	Tesso Nilo Block
52	PT. RAPP - Logas South (Sei Tasem)	137/Kpts-II/1997	3,155	Rimbang Baling Block
53	PT. RAPP - Cerenti (PHBM)	256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001	4,835	Bukit Tigapuluh Block
54	PT. RAPP - Tesso West (Siabu)	256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001	987	Rimbang Baling Block
55	PT. RAPP - Tesso West (Sukamenanti)	256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001	967	Rimbang Baling Block
56	PT. RAPP - Pontianai	256/Menhut-VI/2001, 22-02-2001	18,898	Bukit Tigapuluh Block

**Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia"**

Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau

57	PT. Seraya Sumber Lestari	03/IUPHHKHT/II/2003, 27-01-2003	18,767	Giam Siak Kecil Block
58	PT. Sari Hijau Mutiara	277/Menhut-IV/1998, 25-02-1998	20,000	Bukit Tigapuluh Block
59	PT. Selaras Abadi Utama	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005, 30-12-2002		Kerumutan Block
60	PT. Riau Bina Insani	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001.A, 01-06-2003	4,256	Tesso Nilo Block
61	PT. Merbau Pelalawan Lestari	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, 17-12-2002	5,970	Kerumutan Block
62	CV. Alam Lestari	522.21/IUPHHKHT/I/2003/015, 30-01-2003	4,729	Kampar Peninsula Block
63	PT. Megah Pusaka Lestari	NI	37,849	Bukit Tigapuluh Block
64	PT. Triomas FDI	522.21/IUPHHKHT/I/2003/012, 29-01-2003	9,711	Kampar Peninsula Block
65	PT. Karya Muda Belia	NI	6,708	Bukit Tigapuluh Block
66	PT. Uni Seraya	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006, 30-12-2002	33,360	Kampar Peninsula Block
67	PT. Sumber Maswana Lestari	Kpts.18 tahun 2003, No Date 2003	5,256	Bukit Tigapuluh Block
68	PT. Sumber Maswana Lestari	Kpts.18 tahun 2003, No Date 2003	3,999	Bukit Tigapuluh Block
69	PT. Bina Daya Bintara		5,772	Libo Block
70	PT. Madukoro	522.21/IUPHHKHT/I/2003/017, 31-01-2003	14,678	Kampar Peninsula Block
71	CV. Harapan Jaya	522.21/IUPHHKHT/I/2003/016, 31-01-2003	4,886	Kampar Peninsula Block
72	PT. National Timber & Forest Products	06/IUPHHK/II/2003, 03-02-2003	9,300	Kampar Peninsula Block
73	PT. RAPP - Cerenti	137/Kpts-II/1997	29,199	Bukit Tigapuluh Block
74	PT. Nusa Prima Manunggal (Raja Garuda Mas Sejati)	522/EKBANG/902, 23-06-2003	14,876	Tesso Nilo Block
75	PT. RAPP - Mandau	137/Kpts-II/1997	24,610	Giam Siak Kecil Block
76	PT. Nusa Wana Raya	444/Kpts-II/1997, 06-08-1997	26,880	Tesso Nilo Block
77	CV. Marta Teknik/plan		20,667	Bukit Tigapuluh Block
78	PT. Lestari Unggul Makmur		10,390	Island
79	PT. Rimba Rokan Hulu		12,500	Libo Block
80	PT. Sumatera Riang Lestari		148,075	Island
81	PT. RAPP Blok Pulau Padang		41,205	Island
82	PT. RAPP Blok Tasik Belat		12,450	Kampar Peninsula Blok
83	PT. RAPP Blok Sungai Kampar		43,400	Kampar Peninsula Blok
	<b>Total</b>		<b>1,159,047</b>	

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Riau, dan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, September 2010. (diolah)

Kerjasama antara PT RAPP dan mitra-mitranya yang mensuplai bahan baku dari tahun ke tahun ke Pabrik Pulp dan Paper PT RAPP tetap eksis. Ini terlihat dengan ditetapkannya pengesahan RKT HTI pada hutan alam tahun 2009 terhadap 12 perusahaan dari 83 perusahaan di atas di Propinsi Riau yang merupakan mitra pemasok bahan baku bagi PT RAPP. Berdasarkan tabel 8, luas RKT HTI Tahun 2009 perusahaan mitra PT RAPP di atas kawasan hutan alam di Propinsi Riau yang disahkan Kementerian Kehutanan sebesar 74.099 Ha, dengan target produksi sebesar 8,761,108.38 M<sup>3</sup> yang terdiri dari KB (50 cm up) sebesar 222.529,05 M<sup>3</sup>, KBS (30-49 cm) 1.567.467,18 M<sup>3</sup>, dan KBK 6.964.112,15 M<sup>3</sup>.

Tabel 8: Luas RKT HTI dan Target Produksi Log pada hutan alam Tahun 2009 perusahaan mitra PT RAPP di Propinsi Riau yang telah disahkan Kementerian Kehutanan.

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SK. Pengesahan RKT	Luas (Ha)	Target Produksi (M3)
1	PT. Riau Andalan Pulp and Paper	SK. 19/BPHT-3/2009, 07 Sept 2009	19,286.00	2,207,618.00
2	PT. Sumatra Riang Lestari	SK. 02/BPHT-3/2009, 23 Maret 2009, jo SK. 06/BPHT-3/2010, 5 Feb 2010	20,107.00	2,583,024.00
3	PT.Siak Raya Timber	SK.20/BPHT-3/2009. 19 Juni 2009	350.00	28,970.00
4	PT. Uniseraya	SK. 24/BPHT-3/2009. 17 Juni 2009	6,165.00	712,400.00
5	PT. Bina Daya Bintara	SK. 22/BPHT-3/2009. 26 Mei 2009	1,710.00	317,800.00
6	PT.Seraya Sumber Lestari	SK. 23/BPHT-3/2009. 3 Juni 2009	6,461.00	1,060,000.00
7	PT.Bukit Betabuh Sei Indah	SK. 27/BPHT-3/2009, 18 Agustus 2009	2,984.00	146,170.00
8	PT.Citra Sumber Sejahtera	SK. 05/BPHT-3/2009, 31 Maret 2009 jo, SK.38/BPHT-3/2009	4,536.00	635,810.00
9	PT.Mitra Kembang Selaras	SK. 07/BPHT-3/2009, 02 April 2009	3,420.00	365,849.38
10	PT.Rimba Rokan Lestari	SK.35/BPHT-3/2009, 30 Oktober 2009	3,711.00	308,700.00
11	PT.Lestari Unggul Makmur	SK.13/BPHT-3/2009, 13 April 2009	2,899.00	262,837.00
12	PT.Perkasa Baru	SK.34/BPHT-3/2009, 30 Oktober 2009	2,470.00	131,930.00
	<b>TOTAL</b>		<b>74,099.00</b>	<b>8,761,108.38</b>

Sumber: Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, 2009. (diolah)

### III. A. 2. PT Indah Kiat *Pulp and Paper* (PT IKPP)

PT IKPP merupakan salah satu perusahaan di bawah payung *Asia Pulp and Paper Company Ltd.* (APP) yang tergabung dalam grup Sinar Mas. Sejak awal berdiri sampai saat ini PT IKPP telah meningkatkan kapasitas pabrik pulp dari 105.000 ton menjadi 2 juta ton per tahun. Sejauh ini PT IKPP memperoleh pasokan bahan baku dari HTI PT Arara Abadi yang juga merupakan anak perusahaan APP.

PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pengusahaan hutan tanaman industri untuk mendukung penyediaan bahan baku kayu bagi industri pulp dan kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin Menteri Kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 299.975 ha melalui SK No 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada empat tempat yang dikenal dengan istilah distrik dan setiap distrik tersusun atas beberapa resort.

Sejak pertengahan 1980-an atau tepatnya di tahun 1987 PT Arara Abadi mulai membangun HTI untuk memasok bahan baku pabrik pulp PT IKPP. Menurut data Perkembangan Realisasi Tanaman IUPHHK-HT monitoring s/d bulan April 2009 (Ditjen. BPK, 2009), PT Arara Abadi telah merealisasikan tanaman seluas 398.269 ha selama 21 tahun beroperasi atau rata-rata hanya seluas 18.900 ha setiap tahun. Realisasi penanaman HTI setiap tahun menunjukkan luasan yang bervariasi mulai dari yang terendah seluas 9.038 hektar di tahun 2000 dan yang tertinggi di tahun 2007 seluas 32.558 hektar.

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan, Dishut Riau, dan Pengecekan Informasi Lapangan, terdapat 46 perusahaan yang bermitra dengan PT IKPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin PT Arara Abadi sendiri seluas 299.975 Ha adalah seluas 953.139 Ha<sup>17</sup>. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa PT IKPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di atas lahan hutan seluas hampir satu juta hektar hanya di Propinsi Riau saja.

Tabel 9: Kelompok Perusahaan HTI yang Bermitra dengan PT IKPP

No	Nama Perusahaan	Izin Tahun	Luas Areal (Izin)	Block
1	2	3	4	5
1	PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang	634/Menhutbun-V/1999, 16-06-1999	8,764	Senepis Block
2	PT. Santara Gajapati	71/Kpts-II/2001, 15-03-2001	34,792	Senepis Block
3	PT. Ruas Utama jaya	1179/Menhutbun-VI/99, 27-08-1999	44,330	Senepis Block
4	PT. Ruas Utama jaya	1179/Menhutbun-VI/99, 27-08-1999		Senepis Block

<sup>17</sup> Data Per September 2010, Kementerian Kehutanan dan Dishut Riau

**Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia"**

Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau

5	PT. Surya Dumai Agrindo	314/Menhut-IV/1998, 07-03-1998	11,802	Senepis Block
6	PT. Bukit Batu Hutani Alam	365/Kpts-II/2003, 30-10-2003	33,605	Giam Siak Kecil Block
7	PT. Surya Dumai Agrindo	314/Menhut-IV/1998, 07-03-1998	7,822	Giam Siak Kecil Block
8	PT. Sakato Pratama Makmur	366/Kpts-II/2003, 30-10-2003	46,230	Giam Siak Kecil Block
9	PT. Satria Perkasa Agung	224/Kpts-II/2000, 22-08-1995	76,017	Giam Siak Kecil Block
10	PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia & KTH. Wana Jaya	803/Menhutbun-V/99, 22-07-1999	21,880	Giam Siak Kecil Block
11	PT. Satria Perkasa Agung	224/Kpts-II/2000, 22-08-1995		Giam Siak Kecil Block
12	Koperasi Asa Tuah Anak Negeri (ATAN)	44/Menhut-VI/2000, 28-11-2000	3,166	Libo Block
13	PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang	634/Menhutbun-V/1999, 16-06-1999	898	Kerumutan Block
14	PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang - Pulau Muda	634/Menhutbun-V/99, 16-06-1999	9,300	Kerumutan Block
15	PT. Arara Abadi - Sedinginan	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996	299,975	Senepis Block
16	PT. Arara Abadi - Sedinginan	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Senepis Block
17	PT. Arara Abadi - Beringin	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Senepis Block
18	PT. Arara Abadi - Beringin	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Giam Siak Kecil Block
19	PT. Arara Abadi - Minas	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Libo Block
20	PT. Arara Abadi - Minas	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Libo Block
21	PT. Arara Abadi - Minas	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Libo Block
22	PT. Arara Abadi - Minas	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Libo Block
23	PT. Arara Abadi - Minas	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Libo Block
24	PT. Arara Abadi - Pelalawan	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Kerumutan Block
25	PT. Arara Abadi - Pelalawan	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Kerumutan Block
26	PT. Arara Abadi - Pulau Muda	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Kerumutan Block
27	PT. Arara Abadi - Nilo	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Tesso Nilo Block
28	PT. Arara Abadi - Pelalawan	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Kerumutan Block
29	PT. Satria Perkasa Agung - Pulau Muda	224/Kpts-II/2000, 22-08-1995		Kerumutan Block
30	PT. Rimba Seraya Utama	599/Kpts-II/1996, 16-09-1996	12,600	Tesso Nilo Block
31	PT. Artelindo Wiratama	Kpts.74/IV/2002, 11-04-2002	10,740	Bukit Tigapuluh Block
32	PT. Putra Riau Perkasa	522.21/IUPHHKHT/V/2002/002, 08-05-2002	15,640	Kampar Peninsula Block
33	PT. Satria Perkasa Agung - Serapung	522.21/IUPHHKHT/I/2003/013, 29-01-2003	11,830	Kampar Peninsula Block
34	PT. Mitra Hutani Jaya	522.21/IUPHHKHT/I/2003/014, 29-01-2003	9,240	Kampar Peninsula Block
35	PT. Insan Sastra Abadi	414/Menhutbun-VI/99, 15-03-1999	2,782	Senepis Block
36	Koperasi Ikram	522/EKBANG/2337, 29-09-2001	2,748	Senepis Block

**Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia"**

Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau

37	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	249/Kpts-II/1998, 27-02-1996		Rimbang Baling Block
38	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	249/Kpts-II/1998, 27-02-1996		Libo Block
39	PT. Bina Duta Laksana	17.A/TP/VI/2002, 03-06-2002	28,890	Kerumutan Block
40	PT. Balai Kayang Mandiri	04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003	22,250	Libo Block
41	PT. Balai Kayang Mandiri	04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003		Kampar Peninsula Block
42	PT. Balai Kayang Mandiri	04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003		Giam Siak Kecil Block
43	PT. Rimba Mandau Lestari	05/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003	5,630	Giam Siak Kecil Block
44	PT. Bina Daya Bentala	02/IUPHHKHT/II/2003, 18-01-2003	19,870	Libo Block
45	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	249/Kpts-II/1996, 27-02-1996	50,725	Rimbang Baling Block
46	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	249/Kpts-II/1996, 27-02-1996		Rimbang Baling Block
47	PT. Liwa Perdana Mandiri	NI	17,323	Giam Siak Kecil Block
48	PT. Tiara Cahaya Delima	NI	15,046	Giam Siak Kecil Block
49	PT. Arara Abadi - Siak	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Kampar Peninsula Block
50	PT. Rimba Rokan Perkasa	01/IUPHHKHT/II/2003, 16-01-2003	22,930	Libo Block
51	PT. Riau Indo Agropalma	17.b/TP/VI/2002, 03-06-2002	9,570	Kerumutan Block
52	PT. Insan Sastra Abadi	414/Menhutbun-VI/99, 15-03-1999	23,002	Libo Block
53	PT. Sakato Pratama Makmur	366/Kpts-II/2003, 16-8-2003		Giam Siak Kecil Block
54	PT. Riau abadi Lestari	542/Kpts-II/1997, 25-08-1997	12,000	Libo Block
55	PT. Arara Abadi - Duri	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Giam Siak Kecil Block
56	PT. Riau abadi Lestari	542/Kpts-II/1997, 25-08-1997		Giam Siak Kecil Block
57	PT. Arara Abadi - Duri	743/Kpts-II/1996, 25-11-1996		Giam Siak Kecil Block
58	PT. Riau abadi Lestari	542/Kpts-II/1997, 25-08-1997		Giam Siak Kecil Block
59	PT. Bina Keluarga	NI	9,150	Kerumutan Block
60	PT. Mapala Rabda (eks SWS)/		11,548	Bukit Tigapuluh Block
61	PT. Mapala Rabda (eks SWS)/		20,803	Bukit Tigapuluh Block
62	PT. Inhil Hutani Pratama	188.342/HK/043, 20-01-2006	11,571	Kerumutan Block
63	PT. Prima Bangun Sukses		8,670	Island
<b>Total</b>			<b>953,139</b>	

Sumber: Dinas Kehutanan, dan Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, September 2010. (diolah)

Bersama PT Arara Abadi, 13 perusahaan mitra IKPP pada tahun 2009 telah mendapat Izin Rencana Karya Tahunan (RKT) di atas hutan alam untuk pengambilan bahan baku bagi pabrik Pulp PT IKPP. Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat luas ijin RKT HTI Tahun 2009 perusahaan mitra PT IKPP di atas kawasan hutan alam di Propinsi Riau yang disahkan Kementerian Kehutanan sebesar 56,659.25 Ha, dengan target produksi sebesar 4,617,716.17 M<sup>3</sup> yang terdiri dari KB (50 cm up) sebesar 526,675.23 M<sup>3</sup>, KBS (30-49 cm) 1,058,933.21 M<sup>3</sup>, dan KBK 3,032,107.73 M<sup>3</sup>.

Tabel 10: Luas RKT HTI dan Target Produksi Log pada Hutan Alam Tahun 2009 dari perusahaan mitra IKPP di Propinsi Riau yang telah disahkan Kementerian Kehutanan.

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SK. Pengesahan RKT	Luas (Ha)	Target Produksi (M3)
1	PT. Arara Abadi	SK.20/BPHT-3/2009. 14 Mei 2009	3,306.00	192,900.00
2	PT. Satria Perkasa Agung	SK.17/BPHT-3/2009. 12 Mei 2009	3,558.00	216,450.00
3	PT. Ruas Utama Jaya	SK.19/BPHT-3/2009. 13 Mei 2009	9,977.00	758,700.00
4	PT. SPA Unit Serapung	SK. 10/BPHT-3/2009. 02 April 2009	1,822.00	132,109.59
5	PT. Balai Kayang Mandiri	SK. 16/BPHT-3/2009. 8 Mei 2009 jo, SK.36/BPHT-3/2009, 18-11-2009 jo, SK.40/BPHT-3/2009, 21-12-2009	7,359.20	455,300.00
6	PT. Rimba Mandau Lestari	SK. 09/BPHT-3/2009. 02 April 2009 jo, SK.37/BPHT-3/2009, 18-11-2009 jo, SK.01/BPHT-3/2010, 6-1-2010	2,469.05	309,948.00
7	PT. Artelindo Wiratama	SK. 15/BPHT-3/2009, 15 April 2009	4,940.00	365,500.00
8	PT. SPA KTH Merawang	SK. 06/BPHT-3/2009, 02 April 2009	2,680.00	408,159.24
9	PT. Bina Duta Laksana	SK. 04/BPHT-3/2009, 27 Maret 2009	4,150.00	363,291.00
10	PT. Riau Indo Agropalma	SK. 08/BPHT-3/2009, 02 April 2009	2,915.00	222,320.22
11	PT. Bina Daya Bentala	SK. 11/BPHT-3/2009, 30 April 2009	8,138.00	786,798.12
12	PT. Perawang Sukses Perkasa Ind	SK.18/BPHT-3/2009, 12 Mei 2009	1,182.00	36,490.00
13	PT. Suntara Gaja Pati	SK.03/BPHT-3/2009, 27 Maret 2009 jo, SK.29/BPHT-3/2009, 7-9-2009	4,163.00	369,750.00
<b>TOTAL</b>			<b>56,659.25</b>	<b>4,617,716.17</b>

Sumber: Kementerian Kehutanan, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, 2009. (diolah)



Sebagai perusahaan produsen pulp yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia, PT RAPP dan PT IKPP sejak lama telah menjadi sorotan masyarakat luas terkait kemampuan dalam memasok bahan baku dari hutan tanaman yang dibangunnya. Melihat kinerja pembangunan hutan tanamannya dapat dikatakan prestasi penanaman kedua perusahaan ini ibarat jalan di tempat atau berjalan sangat lambat.

Namun jika diukur dari keseriusannya dalam membangun industri pulp dan memastikan pasokan yang lestari dari Hutan Tanaman Industri, kedua perusahaan ini sama-sama menunjukkan komitmen yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari komitmen PT RAPP yang sangat optimis mampu memasok secara lestari seluruh bahan bakunya dari HTI sebesar 9 juta m<sup>3</sup> mulai tahun 2009<sup>18</sup>. Sementara PT IKPP dalam laporan tahunannya di tahun 1999 menyatakan seluruh bahan bakunya dapat dipenuhi secara lestari dari pasokan HTI grup Arara Abadi mulai tahun 2004<sup>19</sup>. Target ini terbukti tidak terpenuhi. Di tahun 2004 APP

---

<sup>18</sup> APRIL 2004, Sustainability Report 2004: APRIL 2006, Sustainability Report 2006.

<sup>19</sup> IKPP, 1999 dalam Barr, 2000.

merevisi target pemenuhan bahan bakunya akan terpenuhi di tahun 2009<sup>20</sup>. Lagi-lagi target ini terbukti tidak terpenuhi.

Selama periode 2004 – 2008 PT RAPP dan PT IKPP rata-rata setiap tahunnya masih mengandalkan 50% atau berkisar 8,8 juta M3 per tahun pasokan bahan baku dari hutan alam, dan sisanya sekitar 8,9 juta M3 per tahun dari Hutan Tanaman, (Tabel 11). Dengan tidak terpenuhinya target pasokan bahan baku yang bersumber sepenuhnya dari hutan tanaman maka akan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam tersisa di Riau karena secara otomatis demi mencukupi kebutuhan bahan bakunya kedua perusahaan ini akan terus meminta izin penebangan pada hutan alam. Dalam beberapa pernyataannya, kedua perusahaan ini menyebutkan bahwa mereka masih menggunakan sumber bahan baku dari hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku serat panjang bagi industry pulp.

Tabel 11: Pasokan bahan baku dari hutan tanaman dan hutan alam sepanjang 2004-2008 untuk PT RAPP dan PT IKPP

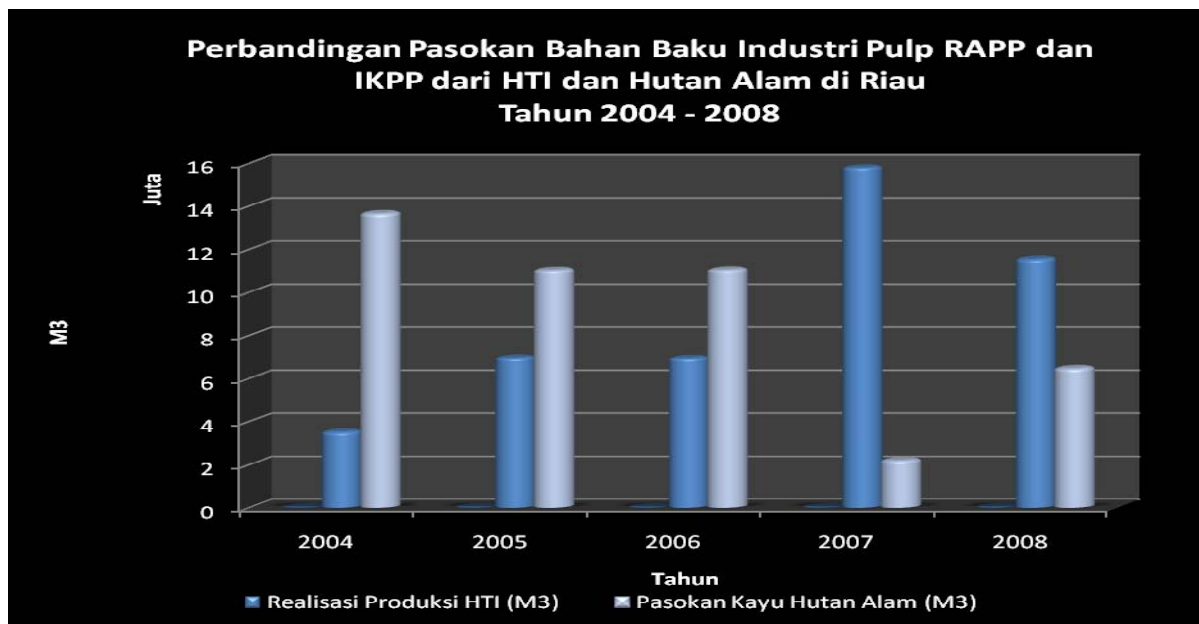
Tahun	Kapasitas Pabrik (Ton)	Kebutuhan Bahan Baku (M3)	Realisasi Produksi HTI (M3)	Pasokan Kayu Hutan Alam (M3)	Persentase HA (%)
2004	3,820,000	17,190,000	3,520,488	13,669,512	80
2005	4,000,000	18,000,000	6,963,169	11,036,831	61
2006	4,000,000	18,000,000	6,946,195	11,053,805	61
2007	4,000,000	18,000,000	15,798,722	2,201,278	12
2008	4,000,000	18,000,000	11,532,300	6,467,700	36

Sumber: Dephut, (diolah)

Permintaan bahan baku berdasarkan kapasitas pabrik dari kedua industry pulp (PT RAPP dan IKPP) sebesar 18 juta meter kubik per tahun (baik hutan tanaman maupun hutan alam) ternyata sampai saat ini dari data di atas terlihat tidak terpenuhi. Kemungkinan ini yang terus menimbulkan spekulasi dan kecurigaan bahwa kedua industry pulp ini masih menggunakan bahan baku dari "sumber lain di luar mitra-mitranya" untuk memenuhi target pemenuhan bahan bakunya. Kecurigaan dan spekulasi ini, mestinya dijawab oleh ke dua perusahaan ini dengan menyediakan informasi dan data yang terbuka kepada publik untuk menghindari perdebatan para pihak tentang temuan adanya hasil-hasil penebangan illegal di Propinsi Riau yang terkait langsung dengan pasokan bahan baku ke PT RAPP maupun PT IKPP.

<sup>20</sup> APP 2004, APP Sustainability Action Plan

Gambar 2: Grafik Perbandingan Pasokan Bahan Baku Industri Pulp RAPP dan IKPP dari HTI dan Hutan Alam di Riau Tahun 2004-2008



Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan *Pulp*
- Produksi kayu HTI di Riau (Statistik Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2008. Dishut Riau, 2009).

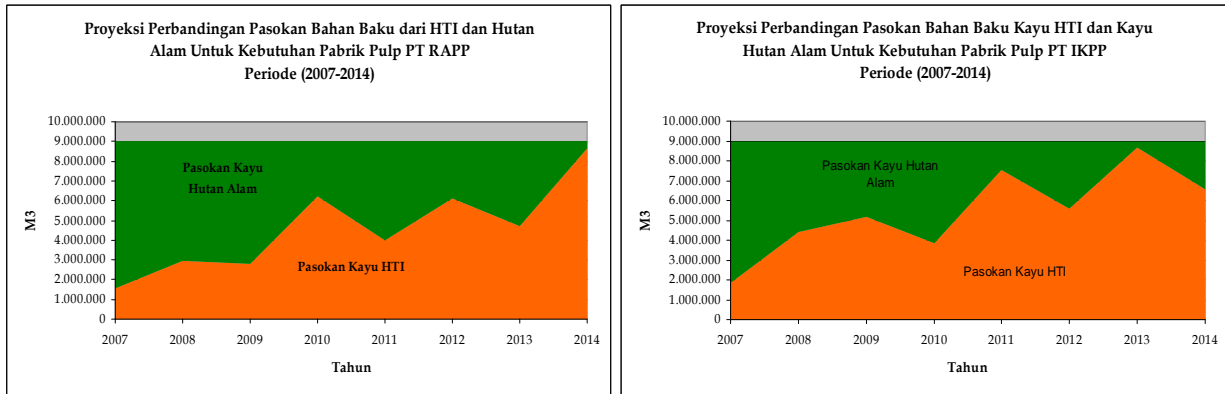
Penggunaan hutan alam sebagai sumber bahan baku bagi PT RAPP dan PT IKPP diprediksikan akan terus dilakukan. Mengingat sampai saat ini kedua perusahaan ini tidak pernah mencapai target penanaman hutan tanaman sebagai sumber bahan baku. Sebuah proyeksi sederhana yang dilaporkan oleh Forest Watch Indonesia (2008), menunjukkan bahwa penggunaan

Data tentang luas realisasi tanam HTI (Ha) dan produksi/penebangan HTI dan Hutan Alam ( $m^3$ ) untuk keperluan Industri Pulp dan Paper di PT RAPP dan IKPP di Propinsi Riau belum terpublikasi secara resmi dengan baik setiap tahun, baik oleh Kementerian Kehutanan maupun oleh pihak Perusahaan. Mengingat data realisasi tanam dan produksi HTI, dan hutan alam kedua-duanya diketahui/disahkan oleh pejabat public (Kementerian Kehutanan) selayaknya data dan informasi ini terbuka kepada public demi kepentingan – fungsi- control dan pengawasan parapihak terhadap pengelolaan hutan alam (Milik Negara) yang dipinjamkan/diberi izin pengolahannya kepada swasta (PT RAPP dan IKPP).

bahan baku lestari secara penuh dari hutan tanaman PT RAPP dan IKPP baru akan hampir terpenuhi pada tahun 2013 - 2014. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan riap pada areal HTI PT RAPP sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun, daur tanam 7 tahun dan kapasitas pabrik yang beroperasi penuh hingga 2 juta ton, dan kebutuhan baku sebesar 9 juta M<sup>3</sup>per tahun. (Gambar 3) <sup>21</sup>

<sup>21</sup> FWI 2008, "Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam".

Gambar 3: Proyeksi Perbandingan Bahan Baku HTI &amp; Hutan Alam PT RAPP dan PT IKPP Periode 2007-2014



## Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*) dengan kapasitas 2 juta ton per tahun
- 1 Ton setara dengan 4,5 M<sup>3</sup> satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI grup Arara Abadi, tidak termasuk HTR
- 1 Ton setara dengan 4,5 M<sup>3</sup> satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI PT RAPP dan *joint venture* ataupun *joint operation* dan HTR
- Pasokan kayu dari HTI dihitung berdasarkan data realisasi tanam setiap tahun (Ditjen. BPK, 2007) , dengan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun dan daur 7 tahun.

**Penguatan Regulasi RKT HTI di Hutan Alam**

Sejak Maret 2009, penggunaan hutan alam sebagai pasokan bahan baku industri pulp dan paper semakin mendapat kekuatan hukum pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-II/2009, tanggal 5 Maret 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II /2008 yang mengizinkan pejabat Kemenhut yang ditunjuk kementerian untuk menerbitkan RKT selain oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, Kementerian Kehutanan sepanjang tahun 2009 telah menerbitkan 25 ijin RKT di atas hutan alam di Propinsi Riau. (Tabel 13).

Ijin tebang RKT HTI di Propinsi Riau Tahun 2009 di atas hutan alam adalah seluas 130.758,25 Ha dengan target produksi sebesar 13.378.824,55 M<sup>3</sup> dengan perincian KB sebesar 756.204,28 M<sup>3</sup> (50 cm up), KS sebesar 2.626.400,39 M<sup>3</sup>, dan KK sebesar 9.996.219,88 M<sup>3</sup> . Sedangkan ijin RKT pada hutan tanaman (*Acasia*) adalah seluas 82.522.18 Ha dengan target produksi sebesar 10.331.109,14 M<sup>3</sup> (Tabel 12). Total produksi kayu bulat kedua perusahaan baik pada hutan alam maupun dari hutan tanaman untuk tahun 2009 berdasarkan target produksi dalam ijin RKT seperti terlihat pada data ini sebesar 23.709.933.69 M<sup>3</sup>. Untuk bahan baku industri pulp, bahan baku kayu yang digunakan adalah ukuran kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil, dengan demikian jika menggunakan data target produksi dalam ijin RKT tahun 2009 PT IKPP dan RAPP maka produksi kayu bulat yang digunakan oleh kedua perusahaan adalah sebesar 22.953.729,41 M<sup>3</sup> (angka ini tidak dihitung jumlah target produksi untuk Kayu Bulat 50 cm up)

Jika demikian, maka apabila disandingkan dengan kapasitas pabrik kedua industry pulp ini yakni sebesar 4 Juta Ton, dengan kebutuhan bahan baku sebesar 18 juta M<sup>3</sup> setiap tahun, maka terlihat adanya *surplus bahan baku sebesar kurang lebih 4,9 juta M<sup>3</sup>* atau sebesar 21,5 %. Kondisi surplus bahan baku ini akan terjadi bila kedua perusahaan ini memanfaatkan secara penuh (100 %) target pemenuhan bakunya dari Ijin RKT di atas hutan alam, dan pemanenan pohon *Acasia* pada hutan tanaman. Jika hal ini yang terjadi, maka sesungguhnya kedua industry pulp ini tidak mengalami kekurangan bahan baku. Surplus produksi berdasarkan RKT ini bahkan dapat mengindikasikan terjadinya pemanfaatan sumberdaya hutan (kayu) secara berlebihan yang dapat meningkatkan deforestasi dan degradasi hutan alam di Riau yang justru terjadi akibat kebijakan (ijin) pemerintah. Berdasarkan data luas areal dan target produksi dari ijin RKT tahun 2009 juga memperlihatkan bahwa di tahun 2009 pemanfaatan hutan alam oleh PT RAPP dan PT IKPP sebesar 54,99 % dibandingkan dengan pemanfaatan bahan baku dari hutan tanaman sebesar 45,01 %, (Tabel 12).

Tabel 12: Perbandingan Sumber Bahan Baku PT RAPP dan IKPP berdasarkan Ijin RKT Tahun 2009 di Propinsi Riau

No	Kawasan	Sumber Bahan Baku			
		Luas Areal (Ha)	Presentase terhadap total luas lahan	Target Produksi (Jt M3)	Presentase terhadap total produksi
1	Hutan Alam	130.758,25	61,31 %	12.622.620,27*	54,99 %
2	Hutan Tanaman**	82.522,18	38,69 %	10.331.109,14	45,01 %
<b>Total</b>		<b>213.280,43</b>	<b>100 %</b>	<b>22.953.729,41</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2009. (diolah)

\*Total Target Produksi Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil

\*\* Pohon *Acasia*

Ijin RKT di tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Permenhut Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-II/2009 di Propinsi Riau teridentifikasi seluruh perusahaannya terafiliasi dan mitra dari PT RAPP dan PT IKPP. Sebanyak 13 perusahaan pemegang ijin RKT di atas hutan alam berada dalam kelompok afiliasi, dan mitra/joint venture, joint operation dengan PT IKPP, dan 12 perusahaan dalam kelompok bisnis PT RAPP. Ke-25 perusahaan tersebut beserta luas areal dan target produksi masing secara terperinci seperti terlihat pada table 13 di bawah.

Tabel: 13: Luas dan Target Produksi RKT HTI Hutan Alam dan Hutan Tanaman Tahun 2009 di Propinsi Riau

No	Nama Perusahaan Kabupaten / Kota	Hutan Alam		Hutan Tanaman	
		Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas ( Ha)	Volume (M3)
<b>Lebih dari 1 Kabupaten</b>					
1	PT. Arara Abadi: SK.20/BPHT-3/2009. 14 Mei 2009				
	Kabupaten Pelalawan	2,016.00	51,605.00	10,387.60	1,157,682.00
	Kabupaten Siak	899.00	131,830.00	14,700.38	1,910,294.00
	Kabupaten Kampar	391.00	9,465.00	1,494.00	124,794.00
	Kabupaten Bengkalis	-	0.00	2,264.20	306,204.00
	Kabupaten Rokan Hilir	-	0.00	2,747.00	336,068.00
	Kota Dumai	-	0.00	438.10	94,958.00
2	PT. Satria Perkasa Agung: SK.17/BPHT-3/2009. 12 Mei 2009				
	Kabupaten Indragiri Hilir	2,816.00	166,832.00	2,122.80	220,984.00
	Kabupaten Indragiri Hulu	742.00	49,618.00	-	-
	Kabupaten Pelalawan	-	0.00	1,837.20	154,315.00
	Kabupaten Bengkalis	-	0.00	4,567.40	415,681.00
3	PT. Ruas Utama Jaya: SK.19/BPHT-3/2009. 13 Mei 2009				
	Kabupaten Rokan Hilir	4,865.00	271,800.00	0.00	0.00
	Kota Dumai	5,112.00	486,900.00	0.00	0.00
4	PT. Riau Andalan Pulp and Paper : SK. 19/BPHT-3/2009, 07 Sept 2009				
	Kabupaten Pelalawan	15,887.00	1,769,553.00	10,200.00	1,447,816.00
	Kabupaten Kuantan Singingi	0.00	0.00	7,547.00	1,205,055.00
	Kabupaten Kampar	0.00	0.00	4,319.00	649,293.00
	Kabupaten Siak	3,399.00	438,065.00	4,654.00	636,081.00
5	PT. Sumatra Riang Lestari: SK. 02/BPHT-3/2009, 23 Maret 2009, jo SK. 06/BPHT-3/2010, 5 Feb 2010				
	Kabupaten Rokan Hilir	1,400.00	81,950.00	0.00	0.00
	Kabupaten Bengkalis	2,889.00	352,727.00	0.00	0.00
	Kabupaten Kepulauan Meranti	6,247.00	642,069.00	0.00	0.00
	Kabupaten Indragiri hilir	9,571.00	1,506,278.00	0.00	0.00
6	PT.Siak Raya Timber: SK.20/BPHT-3/2009. 19 Juni 2009				
	Kabupaten Pelalawan	350.00	28,970.00	400.00	28,970.00
	Kabupaten Kampar	0.00	0.00	203.00	28,301.00
<b>Kabupaten Pelalawan</b>					
1	PT. SPA Unit Serapung: SK. 10/BPHT-3/2009. 02 April 2009	1,822.00	132,109.59	943.00	140,129.80
2	PT. Selaras Abadi Utama SK. 14/BPHT-3/2009. 13 April 2009	0.00	0.00	4,812.00	454,064.00
3	PT. Uniseraya SK. 24/BPHT-3/2009. 17 Juni 2009	6,165.00	712,400.00	0.00	0.00
<b>Kabupaten Siak</b>					
1	PT. Balai Kayang Mandiri: SK. 16/BPHT-3/2009. 8 Mei 2009 jo, SK.36/BPHT-3/2009, 18-11-2009 jo, SK.40/BPHT-3/2009, 21-12-2009	7,359.20	455,300.00	0.00	0.00
2	Pt. Rimba Mandau Lestari: SK. 09/BPHT-3/2009. 02 April 2009 jo, SK.37/BPHT-3/2009, 18-11-2009 jo, SK.01/BPHT-3/2010, 6-1-2010	2,469.05	309,948.00	1,019.00	0.00
3	PT. Bina Daya Bintara: SK. 22/BPHT-3/2009. 26 Mei 2009	1,710.00	317,800.00	0.00	0.00
4	PT.Seraya Sumber Lestari: SK. 23/BPHT-3/2009. 3 Juni 2009	6,461.00	1,060,000.00	0.00	0.00
<b>Kabupaten Indragiri Hulu</b>					
1	PT.Artelindo Wiratama: SK. 15/BPHT-3/2009, 15 April 2009	4,940.00	365,500.00	0.00	0.00
2	PT.Bukit Betabuh Sei Indah: SK. 27/BPHT-3/2009, 18 Agustus 2009	2,984.00	146,170.00	1,652.00	243,210.00

Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Kayu Industri Pulp Dan Paper Di Indonesia"

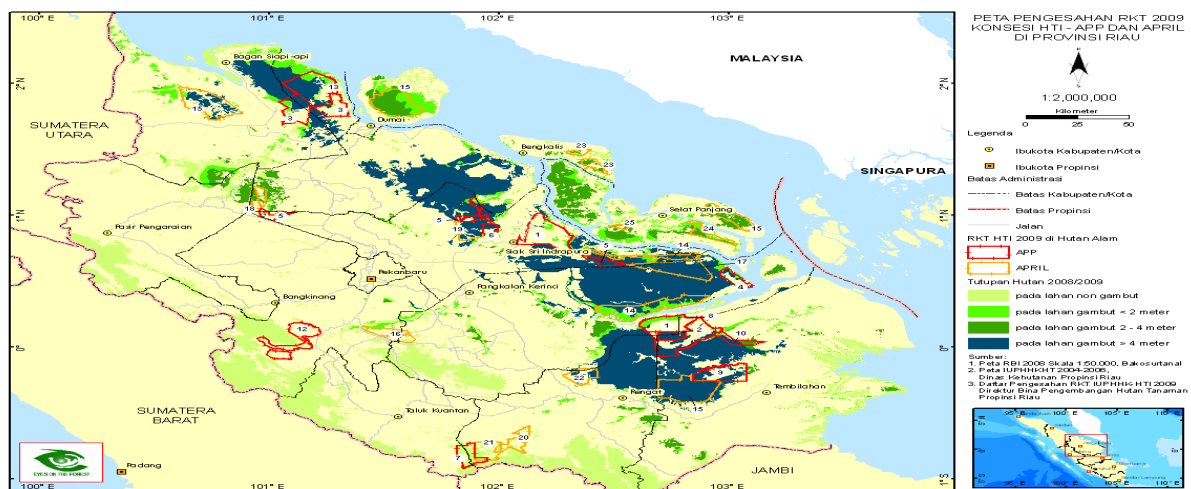
Studi Advokasi: PT RAPP & PT IKPP Di Propinsi Riau

3	PT.Citra Sumber Sejahtera: SK. 05/BPHT-3/2009, 31 Maret 2009 jo, SK.38/BPHT-3/2009	4,536.00	635,810.00	1,866.00	245,087.90
4	PT.Mitra Kembang Seiaras: SK. 07/BPHT-3/2009, 02 April 2009	3,420.00	365,849.38	1,645.00	130,731.44
<b>Kabupaten Indragiri Hilir</b>					
1	PT.SPA KTH Merawang: SK. 06/BPHT-3/2009, 02 April 2009	2,680.00	408,159.24	0.00	0.00
2	PT.Bina Duta Laksana: SK. 04/BPHT-3/2009, 27 Maret 2009	4,150.00	363,291.00	0.00	0.00
3	PT.Riau Indo Agropalma: SK. 08/BPHT-3/2009, 02 April 2009	2,915.00	222,320.22	0.00	0.00
<b>Kabupaten Rokan Hulu</b>					
1	PT. Bina Daya Bentala: SK. 11/BPHT-3/2009, 30 April 2009	8,138.00	786,798.12	0.00	0.00
<b>Kabupaten Bengkalis</b>					
1	PT.Rimba Rokan Lestari: SK.35/BPHT-3/2009, 30 Oktober 2009	3,711.00	308,700.00	0.00	0.00
<b>Kabupaten Kampar</b>					
1	PT.Perawang Sukses Perkasa Ind: SK.18/BPHT-3/2009, 12 Mei 2009	1,182.00	36,490.00	2,703.50	401,390.00
<b>Kota Dumai</b>					
1	PT.Suntara Gaja Pati: SK.03/BPHT-3/2009, 27 Maret 2009	4,163.00	369,750.00	0.00	0.00
<b>Kabupaten Kepulauan Meranti</b>					
1	PT.Lestari Unggul Makmur: SK.13/BPHT-3/2009, 13 April 2009	2,899.00	262,837.00	0.00	0.00
2	PT.Perkasa Baru: SK.34/BPHT-3/2009, 30 Oktober 2009	2,470.00	131,930.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>130,758.25</b>	<b>13,378,824.55</b>	<b>82,522.18</b>	<b>10,331,109.14</b>

Sumber: Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Kemenhut, 2009. (diolah)

Terhadap seluruh ijin RKT perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP dan IKPP ini, laporan Eyes on the Forest sebuah koalisi LSM pemantau hutan di Riau merilis Peta dengan Judul "Pengesahan RKT Konsesi HTI 2009 di Provinsi Riau" memperlihatkan bahwa ijin-ijin RKT HTI pada hutan alam tahun 2009 di Provinsi Riau juga berada di atas lahan gambut sampai pada kedalaman 2 - 4 meter. (Gambar 4)

Gambar 4: Kawasan Gambut yang dijadikan target Ijin RKT HTI di Hutan Alam di Provinsi Riau



Polemik tentang izin penebangan hutan alam di atas lahan gambut menjadi isu yang bersentuhan langsung dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam perjanjian kerjasama dengan Norwegia. Pemerintah Norwegia berkomitmen mendukung upaya-upaya Indonesia dengan dana satu miliar dolar AS untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, serta konversi lahan gambut sebagai upaya kontribusi bagi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan adanya izin penebangan hutan (RKT) HTI di atas lahan gambut di Propinsi Riau sebagai salah satu pilot project dari LoI antara Indonesia-Norwegia untuk penerapan REDD+ sekaligus mengkonfirmasi ketidaksinkronan kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap Komitmen Presiden SBY secara internasional untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia terkait konversi lahan hutan – gambut - yaitu sebesar 41 %.

# 5 PEMENUHAN BAHAN BAKU, DAN KONDISI HUTAN ALAM RIAU

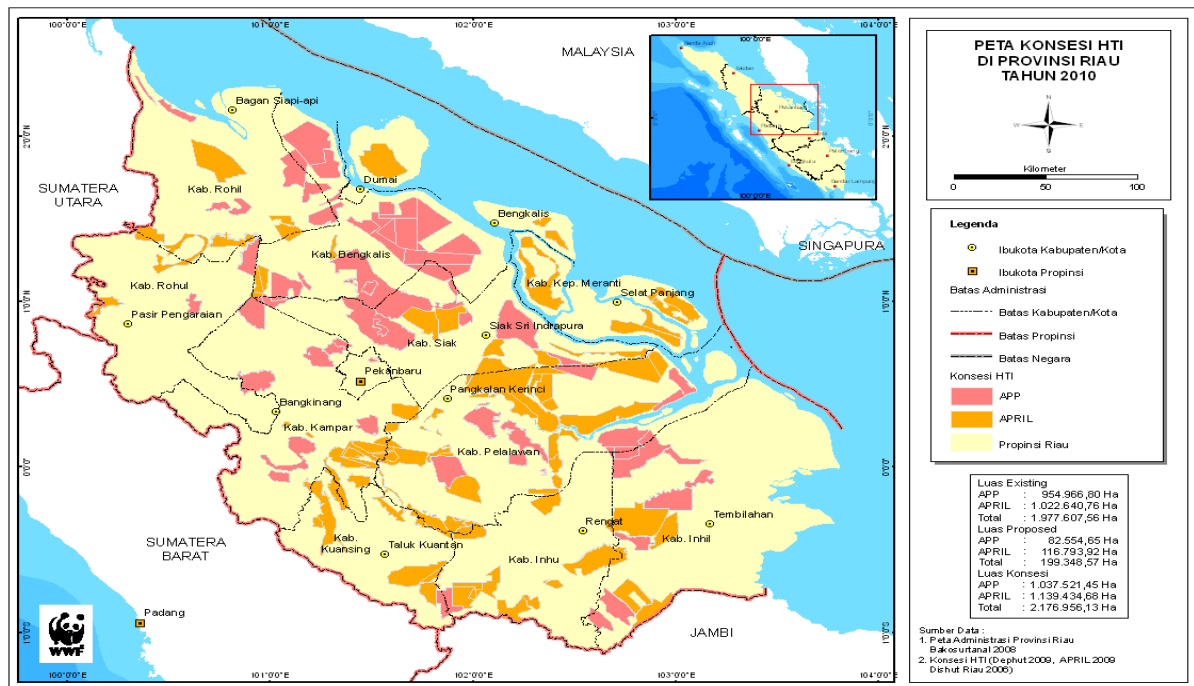


Loading kayu hasil tebangan hutan alam PT SRL Blok Pulau Rupa ke ponton untuk dikirim ke PT. RAPP di Pangkalan Kerinci.

Keberadaan dua industry Pulp and Paper yakni PT RAPP dan PT IKPP di Propinsi Riau menjadi sebuah keniscayaan bagi hutan alam Riau untuk selalu menyediakan bahan baku bagi kedua industry tersebut. Pilihan suplai bahan baku dari luar Riau/bahkan di luar Sumatera sebagai alternative suplai bahan baku bagi kedua perusahaan ini adalah konsekuensi *add cost* atau penambahan biaya produksi yang tentu saja merupakan pilihan ke seratus kali bagi pemilik/manajemen perusahaan. Situasi ini pun akan terjadi jika “mungkin” saja hutan alam Riau mengalami kesulitan untuk menyediakan bahan baku. Kenyataannya tidak demikian. Kondisi hutan alam Riau tetap dilihat sebagai prioritas bagi tersedianya bahan baku PT RAPP dan IKPP.

Data pemetaan yang dibuat WWF Indonesia tentang kawasan HTI yang diterbitkan pemerintah (Kementerian Kehutanan) sampai tahun 2010 memperlihatkan kawasan hutan alam Riau telah dibagi rata untuk memfasilitasi tersedianya kecukupan bahan baku bagi PT RAPP dan PT IKPP di Propinsi Riau. Propinsi Riau bagian Selatan dikuasai oleh mitra PT RAPP (APRIL) sedangkan bagian Utara dikuasai oleh perusahaan mitra PT IKPP (APP). (Gambar 5)

Gambar 5: Penyebaran Konsesi HTI Perusahaan Mitra RAPP dan IKPP di Provinsi Riau



Seperti juga terlihat pada peta di atas, luas izin konsesi Hutan Tanaman Industri IUPHHK HTI di Provinsi Riau yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP dan IKPP tersebut sampai dengan September 2010 adalah seluas 2,112,186 Ha. Kawasan seluas ini dikuasai oleh 153 perusahaan<sup>22</sup>. Dengan kata lain ke 153 perusahaan pemegang konsesi IUPHHK HTI menguasai 48,8 persen dari total luas kawasan hutan Riau atau 62,4 persen dari total luas HP dan HPT kawasan hutan Riau untuk dimanfaatkan sebagai lahan HTI dan atau target produksi pemenuhan bahan baku. (Tabel 14).

Tabel 14: Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Hasil Tata Batas Hutan

No	Fungsi	Luas Ha	% (Total Luas)
1	Hutan Lindung ( HL)	228.793,82	5.29%
2	Hutan Produksi Tetap ( HP)	1.721.094,45	39.82%
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.662.542,19	38.47%
4	Hutan Konservasi	570.814,63	13.21%
5	Kaw. Hutan Bakau	138.433,62	3.20%
<b>Total Luas</b>		<b>4.321.678,71</b>	<b>100%</b>

Sumber: Statistik Dishut Prov Riau, 2006. (diolah)

<sup>22</sup> Hasil kompilasi data izin IUPHHK HTI yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kementerian Kehutanan, dan Pengolahan data lapangan. Terdiri dari ijin yang definitif (existing) dan ijin pencadangan (proposed)

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan luas dan target produksi HTI dari ijin RKT HTI di atas hutan alam dan hutan tanaman tahun 2009 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan bahwa apabila perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP dan IKPP mampu memanfaatkan secara penuh (100%) baik dari hutan alam maupun hutan tanaman sebesar 22.953.729,41 M<sup>3</sup> maka akan terjadi surplus bahan baku di tahun 2009. Namun jika dilihat dari target pemenuhan bahan baku yang bersumber dari Hutan Tanaman yang selalu tidak mencukupi setiap tahun bagi kedua perusahaan ini, maka adalah sebuah kenyataan bila kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas di Riau seluas 62,4 % atau seluas 3,383,636.64 Ha akan tetap menjadi target penebangan untuk memenuhi kecukupan bahan baku PT RAPP dan PT IKPP<sup>23</sup>.

Lemahnya realisasi penanaman hutan tanaman di Propinsi Riau dapat dilihat pada pola realisasi penanaman HTI selama lima tahun dari 2002 – 2006 yang relative sama. Pola ini menunjukkan, realisasi penanaman HTI tidak lebih dari 50 % setiap tahun atau rata-rata setiap tahun hanya 37,99 % dan hanya mampu menyediakan 6,9 juta M3 (2006) atau rata-rata hanya 4,6 juta M3 setiap tahun dari total 18 juta M3 kebutuhan bahan baku kedua perusahaan setiap tahunnya, (Tabel 15). Kondisi lemahnya target penanaman tentu saja juga berdampak pada semakin lambatnya target produksi hutan tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku pengganti bahan baku yang bersumber dari hutan hutan alam yang digunakan oleh PT RAPP dan PT IKPP. Jika pola ini berlangsung terus maka dapat dipastikan bahwa ekspansi perluasan ijin tebang hutan alam bagi kebutuhan bahan baku PT RAPP dan IKPP akan terus berlangsung. Hal ini tentu saja akan menjadi ancaman serius bagi kondisi hutan alam termasuk kawasan-kawasan hutan gambut yang apabila ditebang akan menimbulkan dampak kebakaran hutan di Propinsi Riau dan wilayah sekitarnya.

Tabel 15: Pembangunan Hutan Tanaman Industri ( IUPHHK-HT ) s/d Tahun 2006 di Provinsi Riau

No	Tahun	Target Luas (Ha)	Realisasi Tanam (Ha)	%	Target (M3)	Realisasi (M3)	%
1	2002	1.211.590,00	519.186,00	42.85%	6.941.040,83	2.283.401,87	32.90%
2	2003	1.516.303,00	547.000,74	36.07%	4.994.962,47	3.737.016,01	74.82%
3	2004	1.604.834,00	555.313,63	34.60%	4.610.708,47	3.520.488,12	76.35%
4	2005	219.230,85	86.327,88	39.38%	8.464.698,55	6.963.168,64	82.26%
5	2006	203.442,30	98.669,74	48.50%	9.169.289,00	6.946.195,00	75.76%
<b>Total</b>		<b>4,755,400.15</b>	<b>1,806,497.99</b>	<b>37.99%</b>	<b>34.180.699,32</b>	<b>23.450.269,64</b>	<b>68.61%</b>
<b>Rata2/thn</b>		<b>951,080.03</b>	<b>361,299.60*</b>		<b>6,836,139.86</b>	<b>4,690,053.93</b>	

Sumber: Statistik Dishut Prov Riau, 2006. (diolah)

\*Asumsinya seluruh tanaman HTI digunakan untuk kebutuhan PT RAPP dan PT IKPP di Propinsi Riau

<sup>23</sup> Catatan: Data luas kawasan hutan rusak di Provinsi Riau yang direhabilitasi dengan pembangunan Hutan Tanaman di atasnya tidak terpublikasi sehingga asumsi yang disampaikan adalah data target produksi HTI selalu berada di atas lahan HP & HPT.

# 6 PENUTUP



Lokasi tebangan PT Artelindo Wiratama seluas 2000 hektar hutan alam untuk dijadikan pengembangan Acasia

Melalui pengamatan dan uraian terhadap data dan fakta legal formal dari data resmi *official* Kementerian Kehutanan, maupun Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan hasil penhgumpulan data lapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil studi ini, serta rekomendasi yang ditujukan guna pengambilan keputusan bagi upaya pemenuhan bahan baku bagi industry kehutanan khususnya industry Pulp dan Paper sebagai berikut:

## A. Kesimpulan

1. Besarnya kapasitas terpasang industry kehutanan dan kesenjangan antara kebutuhan dan suplai, serta berlangsungnya penggunaan hutan alam bagi bahan baku industry kehutanan khususnya industry pulp dan paper diakui secara resmi oleh Kementerian Kehutanan dalam beberapa dokumen dan pernyataan pejabat Kementerian Kehutanan. Besarnya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku dan kemampuan suplai hutan alam mencapai angka 20-40 juta M3 setiap tahun. Belum terlihat adanya solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi situasi ini. Perluhah downsizing kapasitas, membatasi ijin industri baru, import bahan baku, ataukah memaksa pemegang ijin HTI untuk menanam areal HTI yang sudah ada. Pembangunan hutan Tanaman industry dan Hutan Tanaman Rakyat sebagai solusi

- menggantikan penggunaan hutan alam berjalan bahkan tidak lebih dari 50 % dari target produksi.
2. Berdasarkan data realisasi tanam HTI 2002 – 2008 dan dengan menggunakan daur tebang 7 tahun dapat diperkirakan luas real tanam HTI 1,414,329 Ha. Sementara itu, IUPHHK HTI sampai 2008 tercatat 10,03 juta hektar dan menurun menjadi 9,21 juta hektar sampai Desember 2009.
  3. Realisasi penanaman HTI PT RAPP sendiri hingga April 2009 telah mencapai luasan 295.332 ha, dari luasan ini sekitar 76.194 ha telah dilakukan pemanenan. Realisasi penanaman HTI setiap tahun menunjukkan luasan yang bervariasi mulai dari yang terendah seluas 9.038 hektar di tahun 2000 dan yang tertinggi di tahun 2007 seluas 32.558 hektar.
  4. PT IKPP dan PT RAPP adalah dua perusahaan *pulp* dan kertas terbesar di Indonesia yang menguasai sekitar 62 persen dari seluruh kapasitas *pulp* nasional. Sampai saat ini kedua perusahaan ini tidak mampu memperoleh pasokan atas seluruh kebutuhan bahan bakunya dari HTI yang telah direalisasikan penanamannya. Dengan kata lain kedua perusahaan ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam. Bahkan diperkirakan kedua perusahaan ini masih belum mampu memasok seluruh kebutuhan bahan baku pabrik *pulp* nya.
  5. Selama periode 2004 – 2008 PT RAPP dan PT IKPP rata-rata setiap tahunnya masih mengandalkan 50% atau berkisar 8,8 juta M<sup>3</sup> pertahun pasokan bahan baku dari hutan alam, dan sisanya sekitar 8,9 juta M<sup>3</sup> per tahun dari Hutan Tanaman. Dengan tidak terpenuhinya target pasokan bahan baku yang bersumber sepenuhnya dari hutan tanaman maka akan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam tersisa di Riau.
  6. Pilihan untuk melindungi sumberdaya hutan Riau dari ekspansi perluasan areal ijin tebang hutan alam guna memasok kebutuhan bahan baku bagi industry pulp paper khususnya PT RAPP dan IKPP di Propinsi Riau semakin diragukan. Hal ini bisa terlihat adanya ijin tebang pada hutan alam untuk kebutuhan bahan baku PT RAPP dan PT IKPP untuk tahun 2009 yang mencapai 54,99 % atau sebesar 12.622.620,27 M<sup>3</sup> dibandingkan dengan pemanfaatan bahan baku dari hutan tanaman sebesar 45,09 % atau sebesar 10.331.109,14 M<sup>3</sup>. Hal ini semakin diperkuat jika dilihat dari pola realisasi tanam hutan tanaman yang hanya 37,99 % setiap tahun di Propinsi Riau yang tentu saja menunjukkan pergerakan yang lambat produksi hutan tanaman bagi pemenuhan bahan baku PT RAPP dan IKPP.

## B. Rekomendasi

1. Moratorium Hasil kayu land clearing untuk industri pulp bisa dipertimbangkan untuk mencegah kerusakan hutam alam Riau lebih lanjut. Kebijakan moratorium ini merupakan:
  - Insentif bagi pengembangan pembangunan HTI karena akan mendesak Perusahaan untuk menanami areal HTI yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah namun belum ditanami sampai saat ini yang diperkirakan seluas (sekitar 10 juta ha – 4 juta ha = 6 juta ha), jika tetap tidak ditanami, sebaiknya areal yang sudah dicadangkan tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah.
  - Insentif bagi Pengembangan HTR karena harga kayu bahan baku pulp akan meningkat akibat moratorium akibat pasokan kayu berkurang
  - Insentif bagi perdagangan karbon dan uangnya dapat digunakan untuk melakukan restorasi hutan alam Riau yang telah rusak
  - Insentif bagi impor pulpwood, sebagai bentuk solusi mengatasi ketersediaan bahan baku bagi industry pulp
  - Disinsentif bagi illegal logging, dimana illegal logging dapat dikontrol karena seluruh kayu untuk bahan baku berasal dari hutan tanaman
2. Di lain pihak, Pemerintah perlu:
  - Membantu dalam penyelesaian tenurial conflicts yang terkait dengan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat adat atau masyarakat local dimana masyarakat perlu mendapat keuntungan ekonomi melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dari kebijakan pembangunan Hutan Tanaman.
  - Mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung pembangunan Hutan Tanaman sekaligus dapat membuka akses transportasi bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.
  - Memberikan bantuan teknis dan financial kepada petani/koperasi hutan dalam ikut mengembangkan usaha-usaha masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan.
  - Menunjukkan kemauan politik dan penegakan hukum yang konsisten dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

## PUSTAKA BACAAN

APP 2004. APP Sustainability Action Plan

APRIL 2004. Sustainability Report 2004

APRIL 2006, Sustainability Report 2006

Departemen Kehutanan 2010, Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 PERMEN Nomor : P.08/Menhut-II/2010

Departemen Kehutanan, 2005. Siaran Pers Dephut: S.569/II/PIK-1/2005 Tanggal 15 September 2005: Industri Kehutanan Prospektif Dengan Investasi 27,8 Milyar Us \$,

Departemen Kehutanan, 2007. Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia. In-house Experts Working Group Revitalisasi Industri Kehutanan

Departemen Kehutanan, 2009. Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2008. Statistik Kehutanan 2008

Departemen Kehutanan, 2009. SK No. 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009.

Departemen Kehutanan, 2010. Laporan Perkembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Triwulan II (April-Juni 2010)

Departemen Kehutanan, 2010. Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 PERMEN Nomor : P.08/Menhut-II/2010

Departemen Kehutanan, 2010. Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2009

Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2007. Statistitik Dishut Propinsi Riau 2006.

Direktori Asosiasi *Pulp* dan Kertas Indonesia. 2007.

Eyes on the Forest, Juli 2010. Bisnis seperti biasanya di Riau: Industri Pulp Melanjutkan Penebangan Hutan Alam.

FWI 2008, "Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam".

IKPP, 1999 dalam Barr, 2000.

[www.anataranews.com](http://www.anataranews.com), Oktober 2010. [Produksi-kayu-hti-diperkirakan-18-juta-m3](#) - 28 oct 2010.